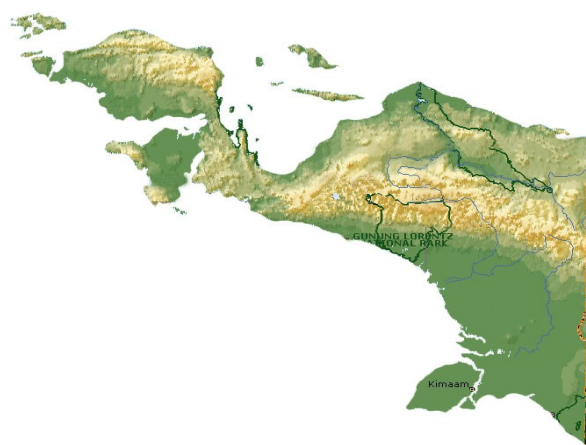


“Upaya Menembus Kebuntuan”

(OKTOBER – DESEMBER 2007)



Sekilas Informasi

OLEH

**SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN
KEUSKUPAN JAYAPURA**

www.hampapua.org

Jayapura 2008



DAFTAR ISI

BAGIAN I LINTAS PERISTIWA OKTOBER – DESEMBER 2007

- A. Hak-hak Sipil dan Politik
 - A. Kebebasan Warga
 - B. Pertahanan Keamanan
 - C. Penyelenggaraan Pemerintahan
 - D. Penanganan Konflik
 - E. Aspirasi `M`
 - F. Pemekaran vs Otsus

- B. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - A. Hak atas Pendidikan
 - B. Hak atas Kesehatan
 - C. Kesejahteraan Umum
 - D. Pengelolaan Sumber Daya Alam

BAGIAN II ANALISIS PERISTIWA

- A. Hak-hak Sipil dan Politik
- B. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

PENUTUP

BAGIAN I

LINTASAN PERISTIWA OKTOBER-DESEMBER 2007

I. HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

A. Kebebasan Warga

7 Oktober

- Pamela Curr, Koordinator [Asylum Seeker Resource Centre Australia](#), dan Kate Gauthier, Koordinator [A Just Australia](#), menuduh Pemerintah Australia telah melanggar Konvensi PBB tentang Pengungsi karena mendeportasi lima warga Papua ke PNG setelah mereka mendarat di Pulau Sabai dan kemudian ditahan selama 26 hari di Tahanan Pengungsi Pulau Horn.

14 Oktober

- Brigpol Zainuddin dan Bripda Jufri menembak tiga penduduk sipil, yakni Lukas Boneba, Kornele Ilo, dan Yohanes hingga terluka di Kampung Brumeso, Distrik Kasenaweja, Kabupaten Sarmi karena alasan yang tidak jelas sekitar pukul 12.00. Kejadian bermula dari kesalahpahaman seorang sopir truk PT Mamberamo Alas Mandiri ketika bertemu dengan tiga warga yang sebenarnya adalah karyawan perusahaan. Karena sopir tidak mengenal mereka, dia tancap gas karena takut melihat ketiga orang tersebut membawa alat tajam. Dia langsung melapor ke Polsek terdekat dan polisi mendatangi ketiga orang tersebut dan melepaskan tembakan dengan senjata jenis SS-1. Lukas dan Kornelis terkena di dada sedangkan Yohanes di bagian kaki kanan.

15 Oktober

- Kapolda Papua Irjen Pol. Drs Max D. Aer, di Jayapura, menegaskan, pihaknya segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota polisi yakni Brigpol Zainuddin dan Bripda Jufri yang menembak tiga penduduk Kampung Brumeso, Distrik Kasenaweja, Kabupaten Sarmi, Minggu (14/10), sekitar pukul 12.00 WIT di desa tersebut. Sesuai laporan yang diterima dari Kapolres Sarmi, penembakan terhadap tiga warga Kampung Brumeso masing-masing Lukas Boneba, Kornelis Ilo, dan Yohanes itu, dilakukan anak buahnya karena warga masyarakat itu dilaporkan menghadang mobil truk yang melewati Kampung Brumeso dengan menggunakan parang dan panah.

16 Oktober

- Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Max Donald Aer mengatakan, pasca terjadinya bentrokan antara kelompok masyarakat dari Suku Baudi, Mamberamo Hilir dengan anggota Polres Sarmi yang sedang melakukan tugas di PT. Mamberamo Alas Mandiri Kabupaten Mamberamo Raya langkah utama yang dilakukan Polri adalah melakukan penyelamatan korban dengan mengevakuasi ke RSUD Dok II Jayapura. "Kami juga berupaya mencegah berkembangnya masalah tersebut dengan memberi penjelasan menenangkan masyarakat. Kapolda juga mengklarifikasi bahwa mereka resmi sedang melaksanakan tugas kepolisian sehubungan dengan adanya laporan penyanderaan sopir truk PT. Mamberamo Alas Mandiri (MAM) oleh sekelompok masyarakat dari Suku Baudi. "Tetapi ketika datang ke TKP anggota tersebut terancam dengan reaksi kelompok masyarakat yang mengancam keselamatan mereka, sehingga mereka melepaskan tembakan peringatan". Namun karena tembakan peringatan itu tidak menyurutkan gerakan masyarakat, kemudian tembakan yang dikeluarkan tersebut diarahkan ke kaki.

Tetapi ada tembakan yang memantul dan mengenai bagian dada seseorang dari kelompok tersebut.”

18 Oktober

- Pemukulan yang dilakukan oleh Sertu Dedy, anggota Kopassus di Keerom, terhadap Kepala Distrik Arso Kota, Drs. Charles Tafor, mengakibatkan ratusan penduduk asli Kabupaten Keerom sekitar pukul 19.00 melakukan pemalangan terhadap jalan di Kabupaten Keerom. Menurut keterangan dari korban, kejadian penganiayaan tersebut hanya gara-gara sorot lampu mobil saat berpapasan. Terkait dengan permasalahan tersebut, perwira penghubung Dandim 1702-Jayapura, Kapten Inf. Untung Sucipto, mengatakan masalah tersebut hanya salah faham dan peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada pimpinan. Terkait dengan tindakan apa yang akan diberikan kepada oknum TNI tersebut bukan kewenangannya melainkan kewenangan pimpinannya. (lihat laporan lengkap dalam www.hampapua.org/skp/indexe.html).
- Sawi Sitapai, Sekjen IGSSARPRI (*Independent Group Supporting Special Autonomous Papua Region*) di PNG, menyatakan sekitar 600 orang Papua yang tinggal di PNG telah setuju untuk dipulangkan ke Papua pada bulan Desember dan Januari.

19 Oktober

- Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Drs. Fr. Andi Lolo, SH, MM, membenarkan adanya penangkapan terhadap tersangka kasus penyebaran SMS teror ini, yakni Sabar Iwanggin sebagai aktivis Elsham; sedangkan Aloysius Renwarin yang menjabat Direktur Elsham Papua mengatakan bahwa yang bersangkutan bukan aktivis Elsham, tetapi relawan Elsham. Menurutnya, penyebaran SMS teror ini tidak dibenarkan, sebab membuat suasana menjadi tidak tenang.

22 Oktober

- TAPOL, salah satu LSM Inggris yang memperhatikan masalah Papua, mendesak Pemimpin Negara-negara Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru, untuk memberikan perhatian khusus terhadap usaha para pembela HAM selama pertemuan mereka di Tonga minggu ini. Tingkat intimidasi terhadap pembela HAM, aktivis politik dan pemimpin agama oleh TNI dan intel telah meningkat terhitung sejak kedatangan Ibu Hina Jilani, Pelapor Khusus PBB tentang Pembela HAM.

1 November¹

- Rudi Pagawak (23Thn) Karyawan PT. [Sinar Mas II](#) di Lereh (Kabupaten Jayapura) tewas setelah dianiaya seorang oknum TNI-AD anggota Korem 172/PWY, Serda Yansen K. Menurut saksi mata Beni Kelila, saat itu korban bersama temannya Jepo bermaksud menelpon keluarganya di wartel koperasi Sinar Mas di lokasi Eko 6. Namun saat itu korban tidak bisa menelpon karena pulsa di wartel tersebut habis. Akhirnya korban bersama temannya mencari wartel lain yakni di Wartel Ridom yang lokasinya masih berada di kawasan perkebunan Sinar Mas. Namun saat korban melewati pos TNI, dia tidak permissi kepada Danpos, Serda Yansen K. Saat melewati Pos TNI itu, korban dua kali menengok ke arah Danpos. Karena curiga dengan korban, tersangka memanggilnya. Menurut Beni Satpam perkebunan Sinar Mas, saat korban datang tersangka langsung menempeleng ke wajah korban. Tidak diterima karena ditempeleng korban sempat melawan. Selanjutnya tersangka membawa korban dan direndam dalam bak air di samping pos. Setelah direndam korban pingsan

1 Bdk. Laporan selengkapnya dalam Tabloid Suara Perempuan Papua, “Lereh Nyanyi Sunyi Buruh Sawit”, No. 15 Tahun IV, 12-18 November 2007.

dan dibawa ke klinik Sinar Mas. Namun saat itu, korban masih belum sadarkan diri. Setelah diperiksa petugas klinik, sekitar pukul 22.00 WIT korban menghembuskan nafas terakhirnya.

2 November

- Sekitar pk. 18.30 WP, 300-an warga Lereh mendatangi Markas Korem 172/ PWY di Padangbulan, Abepura (Kota Jayapura) dengan membawa jenazah Rudy Pagawak. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas tindak penganiayaan 10 orang anggota Korem dan Danpos Serka Yansen K terhadap korban. Warga juga menuntut agar pos TNI digantikan dengan pos polisi. Menanggapi hal tersebut, Danrem Kol. Kav. Burhanuddin Siagian mengatakan bahwa pelaku sudah ditahan di Makorem dan akan diserahkan ke Pomdam XVII/ Cenderawasih untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

3 November

- Tewasnya AKP Yance Ikomau, Kepala Satuan Sampta (Kasat Sampta) Polres Mimika setelah berkelahi dengan Kapolsek Mimika baru AKP Yulius Yawan, membuat situasi Kota Timika tegang dan mencekam. Akibat tewasnya AKP Yance Ikomau, ratusan massa melakukan perusakan kantor Polsek Timika Baru, memblokir sejumlah ruas jalan dengan ban-ban yang dibakar, menaruh batu maupun pohon yang ditumbang dan ditaruh menghadang jalan. Ratusan massa tersebut marah karena mendengar AKP Yance Ikomou salah satu tokoh masyarakat Paniai yang mereka segani tewas akibat berkelahi dengan Kapolsek Mimika Baru AKP Yulius Yawan.

5 November

- Evensius Lusi Tolok, anggota DPRD Kabupaten Jayapura menyesalkan anggota TNI-AD Korem 172/PWY, Serda Yansen K yang melakukan penganiayaan terhadap Korinus Pagawak (23) hingga akhirnya tewas. Bahkan menurutnya baru-baru ini saat dirinya bersama rombongan ke Lereh dalam rangka sosialisasi rencana musyawarah Dewan Adat Yapsi, Kaureh, salah satu supir starwagon DS 7381 JK yang bersama Ismail yang ikut dalam rombongannya mendapat tempeleng dari anggota TNI yang bertugas di Lereh. Alasannya hanya sepele karena mobil starwagon yang diparkirnya agak ke tengah jalan. "Ada juga keluhan dan laporan masyarakat terhadap ulah oknum TNI, namun tidak pernah terekspos" dan dia juga merasa heran mengapa di wilayah perkebunan Kaureh banyak tentara, padahal sudah ada anggota koramil dan juga Polres Kaureh.

6 November

- Di Auckland, Selandia Baru, Jaringan Solidaritas HAM Selandia Baru untuk Indonesia mendesak PM Selandia Baru untuk bereaksi terhadap tindakan penangkapan Sabar Iwanggin oleh Densus 88 Mabes Polri dengan tuduhan menyebarkan SMS yang berisi penghinaan terhadap Presiden.

7 November

- Roby suruan salah satu karyawan di PT. Sinar Mas yang sudah bekerja selama 11 tahun satu bulan di PHK karena persoalan rumah dengan menerima pesangon hanya Rp. 3.470.000,-

9 November

- Kabidhumas Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Agus Riyanto mengatakan kerugian material akibat kerusakan yang dipicu meninggalnya AKP Yance Ikomau (Kasat Samapta Polres Timika) akhirnya ditanggung PT. Freeport dan Pemda Timika. Sementara itu terkait kasus kerusakan yang merupakan buntut perkelahian antara Kapolsek Mimika Baru, AKP Yulius Yawan dengan Kasat Samapta Polres

Mimika AKP Yance Ikomau yang berujung pada meninggalnya AKP Yulius Yawan pihaknya masih terus melakukan penyidikan.

- Jubir Deplu Kristiarto Legowo mengatakan, Prof. Manfred Nowak, pelapor khusus PBB untuk penyiksaan, diundang pemerintah Indonesia untuk mencari fakta terhadap berbagai kasus penyiksaan khususnya yang ada di lembaga pemasyarakatan. Mengenai rincian kasus yang akan diperiksa belum diketahuinya. Rencananya Manfred Nowak akan berkunjung ke Indonesia tanggal 11-25 November. Selain bertemu dengan beberapa menteri, aktivis LSM yang bergerak di bidang HAM, Nowak juga akan mengunjungi beberapa lembaga pemasyarakatan.

10 November

- Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH bakal mengajukan gugatan *class action* terhadap Kejaksaan Agung RI karena dinilai tidak serius dalam menangani kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada peristiwa Wasior Berdarah yang terjadi pada tahun 2001. Langkah lainnya yakni akan melaporkan kasus ini ke Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, agar dapat menekan pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikannya secara hukum.

12 November

- Usai bertemu dengan Komnas HAM di ruang pleno Gedung Komnas HAM Jakarta, Prof. Manfred Nowak, [Pelapor Khusus PBB Bidang Penyiksaan](#), mengungkapkan agenda kunjungannya ke Indonesia: Tujuannya berkeliling mencari fakta tentang dugaan penyiksaan yang dialami oleh narapidana di penjara. Menurutnya, pihak perwakilan PBB di Indonesia mengatur kunjungannya ke beberapa LP dan pertemuannya dengan beberapa LSM.

22 November

- Rencana pemulangan sekitar 700 warga negara Indonesia asal Papua dari Papua New Guinea (PNG), ditanggapi serius Ketua Forum Komunikasi Pejuang Pembebasan Irian Barat (FKGMP-2IB) Indonesia, Niko Maury. Terkait dengan itu dia meminta supaya pemulangan yang dilakukan itu benar-benar terencana dan dilakukan secara matang sehingga tidak membuat masalah baru di Papua atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Harus ada ketegasan dari pemerintah, jika memang itu dipulangkan maka harus seleksi. Sebab mereka ke PNG atas pilihannya sendiri waktu itu, dan yang dikhawatirkan jika itu dipaksakan untuk dipulangkan ke Papua, justru masalah baru yang akan muncul."

23 November

- Pelapor Khusus PBB tentang Anti Penyiksaan, Manfred Nowak, mengadakan jumpa pers di kantor PBB di Jakarta sebagai penutup dari kunjungannya ke Indonesia, termasuk Papua (10-25 November 2008). Pihaknya menyampaikan pokok-pokok temuan tentang tebalnya lingkaran kebal hukum, praktik penyiksaan yang masih berlanjut terutama di lingkungan kepolisian dan penjara-penjara, lemahnya perlindungan hukum dan mekanisme pengaduan bagi korban tindak penyiksaan dan penganiayaan, khususnya bagi perempuan dan anak. Pihaknya merekomendasikan kepada Pemerintah agar:
 1. Pejabat tertinggi secara publik mengecam praktik penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat negara dan hal sedemikian tidak akan dapat dibiarkan;
 2. Menghukum tindak penyiksaan selaras dengan Pasal 1 Konvensi anti Penyiksaan dan menerapkan hukuman yang sepadan;

3. Membentuk mekanisme penyelidikan yang efektif dan independen untuk mengusut tersangka pelaku penyiksaan dan membawa mereka ke pengadilan;
4. Merintis mekanisme pengaduan yang terjangkau dengan mudah dan terlindung di semua tempat tahanan dan menjamin bahwa pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh penyidik independen, dan bahwa pengaduan tersebut tidak akan berbuntut balas dendam;
5. Mengurangi batas waktu penahanan polisi menjadi 48 jam sesuai dengan patokan internasional;
6. Memperbaiki sistem perlindungan terhadap penyiksaan dengan merintis sistem perlindungan yang efektif; membuka akses terhadap pengadilan, pengacara, penyelidikan medis independen terhadap semua orang tahanan entah sudah didakwa atau belum; memastikan bahwa penahanan di pusat-pusat rehabilitasi dapat diselidiki dan dapat diajukan ke mahkamah konstitusi;
7. Menjamin bahwa otopsi independen dilakukan sesudah seorang tahanan meninggal dunia.
8. Mendukung Komnas HAM dan Komnas Perempuan dan Anak memainkan peran aktif dalam memerangi penyiksaan dengan memantau dan memerangi kebal hukum;
9. Menjamin pemisahan anak dari orang dewasa dan pada masa peradilan dengan masa pemenjaraan.
10. Melarang hukuman badan;
11. Membangun mekanisme efektif untuk melarang penggunaan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga;
12. Menaikkan usia minimum tanggung jawab hukum sesuai dengan patokan internasional;
13. Menandatangani Peraturan Tambahan dalam Konvensi Anti Penyiksaan dan menerapkan mekanisme nasional yang efektif untuk melaksanakan kunjungan diam-diam ke semua tempat tahanan; dan,
14. Menghapuskan hukuman mati².

25 November

- Sekitar 200-an kaum perempuan dari berbagai elemen organisasi mengikuti pawai yang digelar oleh Koalisi Perempuan untuk Tanah Damai di Papua. Aksi turun ke jalan ini mengambil *start* di Halaman Kantor Distrik Abepura dan *Finis* di Kantor P3GW Padang Bulan. Koordinator Koalisi Perempuan untuk Tanah Damai di Papua, Ester Burako, SE mengatakan kampanye hari anti kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan 16 hari setiap tahun bukan hanya seremonial belaka namun diisi dengan berbagai upaya dalam bentuk kampanye. Menurutnya "Untuk menegakkan HAM kaum perempuan, pemerintah Provinsi Papua berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan kaum perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memosisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki." Sementara itu tema dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan untuk lokal Papua adalah "Undang-Undang Otonomi khusus berjalan, perempuan asli Papua menderita". Sementara tema nasionalnya adalah "perlindungan terhadap perempuan pembela HAM".

27 November

Sekitar 20 orang karyawan Sinar Mas yang dipimpin langsung Ketua Yayasan Perlindungan Tenaga Kerja (YPTK) Kabupaten Jayapura, Saharudin mendatangi DPRD Kabupaten Jayapura untuk menyampaikan aspirasi terkait

² Laporan selengkapnya dapat dibaca dalam website Kantor PBB di Jakarta: www.un.or.id/press.asp?Act=1&FileID=20071123-1&lang=1

kasus penganiayaan yang dilakukan oknum anggota TNI kepada Rudy Pagawak karyawan Sinar Mas tanggal 18 November sekitar pukul 21.00 WIT, yang langsung di terima Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura, Evansius Tolok dan Ketua Komisi C, Amos Jikwa, Saharudin mengatakan bahwa mereka meminta agar DPRD Kabupaten Jayapura agar dapat melakukan investigasi tentang keberadaan anggota militer yang ada di lokasi perkebunan kelapa sawit Sinar Mas.

29 November

- Kapolresta Kota Jayapura AKBP Roberth Djoenso mengatakan, “Kegiatan 1 Desember jangan ibadah digunakan sebagai ibadah politik. Bila sampai ada ibadah dijadikan tujuan politik maka pihaknya tidak segan-segan memberikan tindakan tegas”.

9 Desember

- Dr. Jim Emslie, ahli ilmu politik dari Universitas Sydney, Australia, meramalkan bahwa berdasarkan keadaan kependudukan Papua sekarang, maka pada tahun 2011 Papua akan didominasi pendatang muslim dan pada tahun 2030, penduduk asli Papua Kristen tinggal 15%. Namun demikian HIV-AIDS akan jauh lebih mempercepat kepunahan penduduk Papua.

10 Desember

- Sekitar 100 an massa dari Solidaritas Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Papua menggelar aksi demo di Lingkaran Abepura. Beberapa pamflet dan spanduk yang dibawa bertuliskan negara wajib melindungi HAM serta melindungi warganya dari pelanggaran HAM di Tanah Papua. Koordinator Kontra Papua, Mathius Murib mengatakan, secara umum perkembangan HAM di Indonesia khususnya di Papua tahun 2007 masih sangat memprihatinkan. Sebab pada kenyataannya penanganan HAM masih sekedar ucapan lisan yang menyenangkan tapi praktek pelaksanaan untuk mewujudkan masih pahit dan getir.
- Koordinator Kegiatan Lokakarya Hak Asasi Manusia (HAM) dan HIV-AIDS Kabupaten Keerom, Ny. Marice R. Tawa mengatakan perempuan dan anak memiliki hak asasi yang sama dengan yang lainnya. Ia menambahkan lokakarya dilakukan sebagai wujud keprihatinan terhadap masalah hak asasi manusia (HAM) yang kurang mendapat perlakuan yang wajar, seperti tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masalah kasus HIV-AIDS yang kian mengkhawatirkan.
- Presiden mengeluarkan PP 77/2007 tentang Lambang Daerah (lihat www.hampapua.org/skp/hukum) yang melarang segala simbol yang berbau separatistis mulai dari Aceh, Maluku, hingga Papua.

11 Desember

- Koalisi Mahasiswa Untuk Masyarakat Peduli Tanah Papua (KMMPTP) menggelar aksi demo di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok II Jayapura. Juru Bicara KMMPTP, Sebby Sambom mengatakan “Pemekaran bukan solusi untuk mengatasi masalah Papua, tetapi sebaliknya dengan pemekaran itu justru memperbanyak proses-proses genosida terhadap masyarakat Papua. Itu sebabnya kami menolak, berhubung pemekaran itu bukan aspirasi murni, tetapi merupakan konspirasi politik”.

13 Desember

- Buku berjudul “Tenggelamnya Rumpun Melanesia” karangan Sendius Wonda, SH, M.Si yang sempat beredar dan dijual di Toko Gramedia Jayapura, disita Kejaksaan Negeri Jayapura. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Asri Agung

Putra, SH, MH mengatakan buku ini berisi hal-hal yang mendiskreditkan pemerintah dan berbau memecah belah persatuan diantaranya menyatakan bahwa virus HIV-AIDS yang berkembang di Papua sengaja disebarkan secara terorganisir oleh pemerintah dengan mendatangkan perempuan pelacur dari Jawa untuk memusnahkan orang Papua.

16 Desember

- Penyitaan buku "Tenggelamnya Rumpun Melanesia" dari pihak Kejaksaan Negeri Jayapura, mendapat reaksi dari Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pdt. Socratez Sofyan Yoman yang merupakan penulis kata pengantar buku tersebut. Menurut Socrates, pelarangan beredarnya buku itu merupakan bukti bahwa NKRI yang sudah merdeka belum dewasa dalam berdemokrasi dan menerima perbedaan yang menunjukkan kekayaan intelektual suatu bangsa. "Buku itu bagian terpenting dari ekspresi situasi riil di Papua. Kenapa dilarang?"

17 Desember

- Asintel Kejaksaan Papua, Indro Joko Pramono mengatakan "Soal Keputusan dan Instruksi Jaksa Agung yang melarang beredarnya buku Tenggelamnya Rumpun Melanesia dan melakukan upaya penyitaan terhadap buku itu, sudah kami teruskan ke seluruh Kejaksaan Negeri se-Papua. Pihaknya akan mempelajari karya Sendius Wonda tersebut terlebih dahulu untuk melakukan tindak lanjut.

28 Desember

- Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH di kantornya, mengatakan sampai akhir tahun 2007, Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menilai situasi dan kondisi hak asasi manusia (HAM) di Papua masih tetap buruk. Penilaian tersebut didasari indikatornya, antara lain, belum adanya upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di beberapa daerah di Papua seperti kasus Wasior berdarah, Manokwari berdarah, Wamena berdarah, Biak berdarah dan lainnya, sejumlah amanat di dalam UU Otsus tentang perlindungan HAM tidak segera didorong pembentukan dan pengesahannya menjadi produk hukum, dan Gubernur Papua belum mengambil langkah-langkah penting dalam mengatur keamanan di Tanah Papua sesuai dengan ketentuan pasal 48 dan 49 UU No. 21/2001 tentang Otsus.

B. Pertahanan dan Keamanan

5 Oktober

- Belden Namah, anggota Parlemen PNG dari Partai Hijau Vanimo dan sekaligus Menteri Kehutanan, mendesak pemerintah untuk memindahkan tentara dari Wewak dan Vanimo ke perbatasan guna mengawasi kegiatan ilegal dan ancaman kedaulatan negara.
- Setelah hilang kurang lebih selama 25 jam (sejak Kamis Pukul 12.00 WIT) akibat dihadang oleh kelompok orang bersenjata tak dikenal di kawasan Kampung Yambi, Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, akhirnya Bripda Edward Inarkombu ditemukan tewas. Anggota Samapta Polres Persiapan Puncak Jaya ini, ditemukan oleh masyarakat Kampung Yambi sekitar pukul 13.00 WIT, tepatnya di Sungai Yambi yang jaraknya sekitar 3,5 Km dari lokasi kejadian (Antara Kampung Yambi-Mulia). Saat ditemukan, korban mengalami luka yang cukup serius di bagian tubuhnya, antara lain luka sabetan parang di tangan sebelah kiri hingga mengakibatkan tulangnya patah, luka robek di bagian mulut ke atas dan ke samping, luka sabetan parang di bawah telinga kanan.

17 November

- Humas PT. Sinar Mas II di Distrik Kaureh (Kabupaten Jayapura), Timotius Sirwa, mengatakan penempatan militer di perusahaan harap dimaklumi karena Papua merupakan Daerah Operasi Militer sehingga TNI yang ditempatkan di sekitar PT. Sinar Mas adalah bagian dari pengamanan.

22 November

- Akibat jatuhnya pesawat helikopter BKO Kodam XVII/Cenderawasih di Sentani, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Haryadi Soetanto, mengaku sangat mempengaruhi proses satuan penugasan (Satgas) yang bertugas di Wilayah perbatasan maupun pedalaman.
- Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Haryadi Soetanto menggelar *coffee morning* di Aula Tonny A. Rompis, Makodam, Polimak, Jayapura. Pangdam mengatakan "Seiring dengan kebebasan pers, saya meminta agar informasi-informasi atau berita-berita yang dipublikasikan kepada masyarakat tetap mengedepankan nilai-nilai edukatif. Dimana dalam penyajiannya harus terukur berdasarkan fakta data di lapangan." Tugas kita bersama adalah mengajak mereka, menyadarkan mereka agar tidak terprovokasi dengan keinginan-keinginan untuk lepas dari NKRI. Upaya yang dilakukan tentu dengan pendekatan kemanusiaan, kesejahteraan dan edukatif."

28 November

- Kapolres Manokwari AKBP Drs Yakobus Marjuki mengatakan di Manokwari meskipun belum terlihat gejala-gejala gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), namun polisi tetap waspada untuk melakukan pengamanan.
- Kapolres Merauke, AKBP Drs. I. Made Djulaidi, SH, didampingi Kabag Ops AKP Andhika Wiratama, SIK, mengatakan Operasi Gabungan yang dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan menjelang 1 Desember mendatang.

29 November

- Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djoenso mengatakan meski menghadapi 1 Desember, Polresta Jayapura tidak memberlakukan siaga I, namun untuk lebih menjamin ketertiban dan keamanan, pihaknya meningkatkan kewaspadaan yaitu dengan peningkatan patroli dan razia gabungan. Ia menambahkan soal ibadah syukur yang direncanakan di Taman Imbi, "Jika dalam Ibadah itu ada orasi-orasi, apalagi mendiskreditkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka saya tidak akan ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas".

3 Desember

- Dandim 1710 Mimika Letkol Inf. Trie Soesono mengatakan meskipun terjadi aksi pengibaran Bendera Bintang Kejora; namun secara umum situasi di Kota Mimika aman dan kondusif. Ia menambahkan mengenai status siaga satu, sudah berakhir hari minggu tanggal 2 Desember. Selain itu dirinya membantah pemberitaan oleh media di luar Timika yang menyebutkan adanya penembakan terhadap dua anggota TNI.

6 Desember

- Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Haryadi Soetanto meminta kepada prajurit satuan penugasan agar selalu mewaspadaai setiap upaya atau gerakan tertentu yang ingin merusak keutuhan NKRI dan meminta prajurit jangan takut

hukum dan HAM sebab, hukum dan HAM bukan untuk ditakuti tetapi untuk ditaati. Hal tersebut dikatakan Pangdam dalam arahannya pada upacara penerimaan Satuan Tugas Yonif 408/subrastah di Pangkalan Satrolas Lantamal X, Porasko Jayapura. Satgas Yonif 408/subrastah akan menggantikan Satgas Yonif 407/Patma Kusuma yang bertugas di Papua selama 1 tahun. Satgas Yonif 408/subrastah berkekuatan 800 prajurit dan akan bertugas di wilayah Papua selama 1 Tahun.

13 Desember

- Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Drs. Agus Rianto mengatakan "Kami akan tetap mewaspadai dan mengawasi terkait dengan 14 Desember yang diklaim sebagai hari kemerdekaan Negara Melanesia Barat. Untuk itu ia menghimbau agar masyarakat melaksanakan kegiatan seperti biasanya dan menghindari tindakan yang mengarah pada perbuatan yang mengganggu keutuhan NKRI. Sementara itu terkait dengan persolan tersebut, Wakil Ketua II DPR Papua, Paskalis Kosay dan Sekretaris Barindo (Barisan Indonesia) Papua, Izak Rumabar mereka menilai ada upaya-upaya dari kelompok tertentu untuk memecah belah masyarakat di Papua.

19 Desember

- Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen Haryadi Soetanto mengatakan "Separatis itu ide. Itu harus dihilangkan, saya tidak melihat mereka disini? Mana kekuatan itu." Kekuatan separatis di Papua sudah menurun, mengenai jumlahnya sulit untuk ditentukan, apalagi separatis merupakan ide yang ada dalam pikiran.

C. Penyelenggaraan Pemerintahan

15 Oktober

- Ketua KPUD Mimika, Yosefina Ana Balla, telah menetapkan pedoman Pilkada dan menyosialisasikannya kepada semua parpol yang terlibat. KPUD juga menetapkan bahwa persyaratan minimal setiap pasangan didukung oleh 15% kursi di DPRD.

1 November

- Puluhan Massa dari Tim Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Pembangunan dan Anti Korupsi Kabupaten Jayawijaya mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan penuntasan kasus korupsi yang terjadi di Jayawijaya. Aksi yang dikoordinir oleh Agus Alua ini, merupakan aksi yang ketiga kalinya. Dalam orasinya Agus Alua menyatakan, penanganan kasus korupsi ini sudah berjalan cukup lama, namun hingga saat ini, belum ada satu tersangka pun dari 38 orang itu yang dibawa ke sidang di pengadilan.

2 November

- Duta Besar Amerika Serikat, Cameron Hume, mengunjungi Pemerintah Provinsi Papua dan Polda Papua. Dalam pertemuannya dengan Wakil Gubernur, Alex Hesegem, SE, pembicaraan didominasi oleh Wagub yang menjelaskan tentang situasi di Papua. Selain masalah ekonomi, kesehatan, Wagub juga menceritakan tentang perang antar kampung di Timika serta meminta agar pemerintah provinsi dilibatkan dalam kontrak karya Freeport sehingga ada transparansi. Selanjutnya dalam pertemuannya dengan Polda yang diwakili oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Drs. F.R Andi Lolo mengatakan kunjungan Dubes AS, hanya merupakan kunjungan silaturahmi, sebab Dubes AS tersebut merupakan pejabat baru.

9 November

- Pernyataan Wapres Muhammad Yusuf Kalla yang meminta agar pejabat dan anggota DPRD di daerah, jangan terlalu sering keluar negeri rupanya ditanggapi positif oleh Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem, SE. Menurutnya, "Boleh saja keluar negeri asal ada izin dari presiden tetapi kalau tidak ada, tidak boleh."

12 November

- Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH menandatangani *memorandum of understanding (MoU)* yang merupakan kontrak kerjasama dengan PT. Arveni Oentoro Surya. Menurut Oentoro Surya, pihaknya akan membangun industri yang akan menyediakan suatu produk untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Papua. Lokasi sementara dikaji oleh Pemprov Papua adalah kawasan Biak dan Yapen Waropen. Apalagi perusahaan tersebut tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas hanya sekitar 5-10 hektar. Sementara itu menurut staf ahli Agus Sumule, "Ada persyaratan memang tetapi tidak mudah. Kebetulan Pak Oentoro datang menawarkan untuk membuat rencana ini dan membawa kapal yang discreb karena kita memang membutuhkan besi batangan dan potongan baja untuk material pembangunan infrastruktur".
- Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH mengatakan dalam kunjungannya ke sejumlah negara baru-baru ini antara lain di Inggris, Belanda dan Cina gubernur telah melakukan sejumlah kontrak yang sudah disepakati rencana pembangunan jalan tol dari Jayapura ke airport (Sentani), lalu jalan tol dari Kota Jayapura ke Pelabuhan Kontainer yang baru di Depapre, serta pembangunan sejumlah sarana prasarana lainnya. Kontrak lainnya yang sudah disepakati adalah rencana pembangunan proyek Listrik Tenaga Air Mamberamo yang memiliki kapasitas listrik yang sangat besar.
- Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, S.IP mengatakan, sebagai pimpinan daerah di Kabupaten Puncak Jaya dirinya melibatkan semua elemen masyarakat dalam pembangunan. "Rakyat bukan penonton, rakyat harus bersama-sama mengisi pembangunan," ungkapnya pada saat pelantikan pengurus LMA (Lembaga Masyarakat Adat), pengukuhan kepala suku, dan pengesahan pejuang Pepera Kabupaten Puncak Jaya.

14 November

- Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH mengumpulkan semua stafnya di Aula Gedung Negara untuk membicarakan berbagai hal menyangkut pembangunan Papua kedepan. Pertemuan yang dihadiri oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Jajaran Pemprov Papua. Disebutkan Gubernur bahwa dari total APBD TA 2007 yang mencapai Rp. 5.856.893.439.625 (5 triliun lebih), realisasi keuangannya baru mencapai Rp. 1,567.186.208.138 atau hanya sebesar 26,76 %. Sementara realisasi fisiknya baru mencapai 33,44 persen. Suatu prosentase yang masih jauh di bawah rata-rata, bahkan jauh dari apa yang pernah ditargetkan.

15 November

- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua (PU) Ir. Jansen Monim, MMT mengatakan menyangkut masih minimnya capaian kegiatan atau proyek-proyek yang dilaksanakan dalam tahun 2007. Ia mengaku kalau sebenarnya tidak ada masalah dan optimis mampu mencapai target diakhir Desember nanti. Namun ia tidak bisa menepis adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang dipimpinnya.

16 November

- Direktur Eksekutif *Institute For Civil Strengthening* (ICS) Budi Setyanto, SH, mengatakan adanya sejumlah bupati di Provinsi Papua yang bepergian ke luar negeri tanpa seizin gubernur, menandakan jika selama ini tidak ada koordinasi yang baik antara gubernur dan bupati. "Mestinya gubernur memberikan teguran keras, jangan tunggu Januari. MRP harus mengambil sikap, sangat disayangkan kalau MRP hanya diam-diam saja. Saya justru menilai adanya sejumlah temuan penggunaan APBD tidak wajar, karena lebih banyak bupati keluar negeri dan ke Jakarta, sehingga gubernur mestinya tegas menindaklanjuti setiap temuan ketidakwajaran dari BPK"

22 November

- Jika sebelumnya melontarkan wacana dana asing masuk melalui satu pintu, kini Ketua Mahkamah Agung Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie meminta lembaga negara tidak terkecuali, tak memakai aliran dana dari luar negeri lagi. "Sebaiknya kegiatan seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif dibiayai dengan APBN."
- "Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Papua terus memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah-wilayah terisolir. Salah satunya menjalin kerjasama dengan yayasan atau gereja dalam merealisasikan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur" kata Kepala BPMD Provinsi Papua, Frans Kristantus, usai memberikan bantuan kepada perwakilan 25 yayasan/ gereja di kantornya.

23 November

- Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menegaskan, masa jabatan bagi pejabat bupati hanya satu tahun. Pj bupati itu juga tidak boleh mundur di tengah jabatannya. "Masih dijumpai yang enam bulan kerja lalu mundur, tiba-tiba maju dalam pilkada, itu tidak boleh," katanya usai melantik tiga pejabat bupati hasil pemekaran di Gedung Sasana Bakthi Praja, Depdagri, Jakarta. Mardiyanto juga mengingatkan, "Agar tidak terlalu banyak menyusun struktur organisasi, lebih ramping, lebih baik dana yang ada bisa digunakan untuk pembangunan, bukan hanya untuk menggaji pegawai".

28 November

- Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi Papua Drs. Yesaya Buiney, MM mengatakan "Mulai sekarang, kita sudah memberlakukan *free assement* bagi setiap perekrutan pejabat di Jajaran Pemprov Papua." Metode tersebut di antaranya menyangkut psikotes bagi setiap calon pejabat baik eselon II maupun eselon III dilingkungan Pemprov Papua. Psikotes sengaja dilakukan untuk mengetahui penempatan calon pejabat yang lebih tepat, sehingga dengan begitu ditempatkan, pejabat yang bersangkutan akan bekerja dengan lebih baik. "*Free assessment* ini sengaja dilakukan untuk mengetahui seorang PNS itu tepatnya ditempatkan di bagian mana atau sebagai pejabat apa. Jadi tidak hanya ditempatkan saja."

29 November

- Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH mengatakan "PNS harus netral dan tidak terlibat dalam urusan politik, tidak memihak terhadap golongan atau parpol manapun". Hal tersebut dikatakan usai mengikuti upacara HUT Korpri di halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

2 Desember

- Diberlakukannya perampingan struktur organisasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2007 tentang pedoman organisasi

perangkat daerah yang ditetapkan Presiden RI 23 juli. Hal tersebut menurut Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH, bertujuan menciptakan suatu birokrasi yang lebih ramping, lebih efisien, lebih disiplin, memiliki kinerja kerja yang tinggi sehingga pelayanan publik dapat meningkat. Restrukturisasi akan direalisasikan pada bulan Januari 2008.

4 Desember

- Rencana pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman organisasi perangkat daerah yang akan diikuti restrukturisasi jabatan tidak terlalu mengkhawatirkan bagi sejumlah pejabat di Pemprov Papua. Kepala Bappeda Provinsi Papua, Drs. Alex Rumaseb mengatakan tiga hal yang menjadi perhatian bagi dirinya, yaitu "**Pertama** adalah sebagai seorang PNS sejak kita dilantik menjadi pegawai negeri kita sudah disumpah bahwa kita harus siap di tempatkan dimana saja". **Kedua**, seorang PNS harus tahu kadang berada di atas dan berada di bawah dan **ketiga** sekarang Pemprov sedang memperbaiki kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga pimpinan akan melakukan apa saja agar kesejahteraan masyarakat itu terwujud. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPR Papua, Drs. Nataniel Aragae dan Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Papua, Drs. F. Kristantus.

12 Desember

- Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I, Drs. Martinus Howay pada acara rapat kerja pembinaan dan penguatan tugas kepala distrik se-Papua di Sasana Krida menyatakan, keinginan masyarakat untuk maju cukup tinggi, namun banyak masyarakat yang masih terpuruk dan masih belum beranjak dari pola hidup tradisional. Gubernur berharap kepada kepala distrik agar senantiasa mengunjungi masyarakat dan mengarahkan supaya rencana strategi pembangunan kampung (Respek) bisa dipahami masyarakat sebagai suatu kebijakan yang berpihak, termasuk dana *block grant* yang telah digulirkan dapat digunakan secara terarah.

20 Desember

- Kepala Pemerintah Kampung (KPK) Skow Mabo, Simon Awee dan Bendahara Kampung Skow Mabo, Nataniel Malo mempertanyakan penyaluran dana pemberdayaan kelurahan/kampung (DP2K) tidak di serahkan kepada mereka, oleh Kepala Distrik Muara Tami, Sefnat Kambuaya, S.Sos, M.Si tetapi langsung di serahkan kepada Ketua Baperkam Kampung Skow Mabo, Yan M. Malo dan sekretaris Kampung Skow Mabo, Isak Sem Malo.

21 Desember

- Wakil Ketua I DPRD, Komarudin Watubun, SH di kantornya mengatakan di akhir anggaran 2007, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Provinsi Papua harus menyelesaikan proyek-proyeknya dengan baik sehingga di tahun anggaran 2008 kinerja SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Papua harus lebih baik.

26 Desember

- Kepala Distrik Oksibil, Rudolf Oktemka, di Bandara Sentani, mengatakan sejumlah pejabat Kabupaten Pegunungan Bintang yang melakukan kunjungan ke Yerusalem (Israel) dipertanyakan oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang.

27 Desember

- Kepala Biro Kepegawaian Provinsi Papua, Drs. Yesaya Buinei, M.Si di kantornya mengatakan pihaknya mensinyalir ada honor siluman dari sekitar 370 honorer yang terdaftar di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

D.Penanganan Konflik

2 Oktober

- Damien Kingsbury mengatakan WPNC (*West Papua National Coalition*) telah menempuh strategi baru dengan mengedepankan dialog damai yang melibatkan pihak ketiga selaku mediator. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesediaan pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam dialog tersebut sebagai penyelesaian politik menyeluruh.

5 Oktober

- [*Franciscans International*](#) menyelenggarakan dua hari pertemuan Jaringan Lintas Agama untuk Papua bertempat di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini dihadiri oleh Justitia et Pax Belanda, ICCO, Cordaid, Geneva for Human Rights, Jaringan Papua di Jerman, United Evangelical Mission dan organisasi berbasis Gereja yang memiliki jaringan ke masyarakat basis di Papua.

19 Oktober

- Perang suku terjadi di Banti, Distrik Tembagapura, antara Suku Amungme (masyarakat Kampung Banti, Tsinga dan Arwanop) dengan Suku Damal (masyarakat Kampung Kimbeli) menyebabkan tujuh orang luka-luka, dua diantaranya mengalami luka berat. Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP Godhelp C. Mansnembra mengatakan, masih ada 11 korban yang menjalani perawatan jalan.
- Untuk menghentikan perang tersebut selain Kapolres AKBP Godhelp C. Mansnembra dan Dandim 1710 Mimika Letkol (inf.) Trie Soeseno, dua tokoh masyarakat yang dimintai bantuannya adalah Pdt. Abidel Tinal dari Amungme dan Ketua Wilayah Gereja Kingmi Pegunungan tengah, Niko Waker. Namun upaya negosiasi dengan kedua kelompok warga yang bertikai belum membuahkan hasil.

22 Oktober

- Kapolres Mimika, AKBP, G.C Mansnembra membenarkan perang kembali terjadi antara warga Banti dan Kimbeli dari pagi hingga sore. Meski demikian aparat keamanan tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya menjaga situasi setempat sehingga tidak meluas atau mengganggu aktivitas di wilayah sekitar.

27 Oktober

- Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan kesepakatan bersama dalam waktu satu minggu ini perang suku yang berlangsung di Timika bisa diakhiri. Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Drs. F.R. Andi Lolo, SH, MH mengatakan dikirimkannya sebanyak 1 SSK (Satuan Setingkat Kompi) Plus karena terdiri dari personil Brimob dan para personil dari Direktorat Reskrim Polda Papua. "Para personil dari tim penyidik ini nantinya akan membantu untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka-mereka yang diduga terlibat sebagai provokator dalam aksi pertikaian antara dua suku tersebut.
- Pertikaian antar Suku Hubi Kurisi dan Suku Kosay Doga atau disebut perang saudara karena kedua suku berasal dari marga yang sama. Perang itu terjadi dipicu dendam yang terjadi 2 tahun lalu tepatnya 16 Juli 2005. saat itu salah seorang yang dianggap cukup berpengaruh (kepala suku) bernama Agalau

Kosay dibunuh oleh Wiliam Wantik. Karena takut akhirnya Wiliam Wantik bersembunyi di hutan beberapa tahun lamanya. Bosan hidup di hutan akhirnya Wiliam Wantik keluar dari persembunyiannya ke kampung Araboda, Distrik Assologaima. Naas bagi Wiliam Wantik saat ia keluar dari hutan, salah satu dari keluarga korban Matus Kosay langsung memotong leher korban dengan sebilah parang dan langsung tewas seketika itu juga. Untuk mencegah timbulnya korban berikutnya, pihak Polresta Jayawijaya memfasilitasi kedua kubu yang berdamai. Dari hasil pertemuan kedua pihak yang bertikai sepakat untuk menuntaskan kasus itu secara adat dengan denda 100 ekor babi. Namun entah dipicu karena apa pertikaian kembali terjadi antara kedua kubu tepatnya di dekat jembatan Distrik Asologaima. Aksi itu menyebabkan seorang anggota polsek Asologaima, Briptu Darsono, terkena anak panah di pelipis kiri saat akan mengamankan situasi. Untuk meredam aksi lanjutan Polres Jayawijaya mengirimkan 2 peleton personil (sekitar 70 orang) ke tempat kejadian perkara. Data korban akibat pertikaian tersebut: Labungka Doga (terkena panah di bagian sebelah kiri, Elias Lengka (terkena anak panah di kaki), Kule Doga (terkena panah di kaki), dan Habatalek Kurisi (terkena anak panah di kaki).

31 Oktober

- Upaya untuk mendamaikan perang suku di Tembagapura, Mimika antara Suku Damal dari Kampung Kimbeli dan Suku Amungme dari Kampung Banti. Menurut Kapolda Papua, Irjen Pol.Dr. Max Donal Aer, "Prinsipnya kami tetap mendorong dilakukannya upaya damai, langkah penegakan hukum secara represif seyogyanya itu dihindari, tetapi jika terpaksa harus dilakukan, maka itu merupakan langkah terakhir, karena pasti akan memakan korban."
- Direktur Eksekutif *Institute For Civil Strengthening* (ICS) Papua, Budi Setyanto, SH dan akademisi Universitas Cenderawasih yang juga Dekan Fisip, Drs. Naffi Sanggenafa, MA. Mereka mengatakan MRP harus lebih banyak melakukan komunikasi atau lobi-lobi. Hal itu dikatakan untuk menanggapi pernyataan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mengatakan bahwa MRP Ibarat sudah dilahirkan di hutan belantara dan sering dicap sebagai separatist sehingga mengalami berbagai kendala dalam memperjuangkan kepentingan hak masyarakat asli Papua melalui Pokja Adat, Pokja Agama, Pokja Perempuan.

1 November

- Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Papua, Komisariss Besar Polisi Agus Riyanto membenarkan adanya rencana pergeseran pasukan. Sesuai rencana besok akan mengerahkan 1 SSK Personil Brimob dari Detasemen A Jayapura ke Timika, Kabupaten Mimika Papua. "Mungkin anggota yang tugas di lokasi perang itu sudah lelah, sehingga perlu tambahan dari sini, guna mengantisipasi perkembangan yang terjadi."

12 November

- Bpk. Bernardino Regazzoni, Duta Besar Swiss untuk Indonesia mengatakan di Yasmin Jayapura dalam acara semiloka Membangun Budaya Damai di Papua, "Kami sangat mendukung program perdamaian di Papua seperti yang dilaksanakan Pusat Pemberdayaan untuk Rekonsiliasi dan Perdamaian (PPRP). Sebagai wakil dari negara sahabat dengan sistem politik yang berlandaskan otonomi daerah, dirinya sangat yakin manfaat efektif kebijakan tersebut guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Karena itu pula rekomendasi yang akan dihasilkan dalam semiloka itu semuanya berkaitan dengan isu pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus."

- Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH mengatakan kedamaian tidak bisa dipisahkan dengan melaksanakan pembangunan sehingga tidak ada damai tanpa pembangunan kesejahteraan. Hal tersebut dikatakannya dalam seminar dan lokakarya membangun budaya damai di Papua di Hotel Yasmin Jayapura. Tentang konflik lanjut gubernur, ada yang bisa ditangani dan diselesaikan secara damai, tetapi ada juga yang bisa dipelihara. Konflik bisa bersifat vertikal dan horisontal. "Ada konflik kecil, ada juga konflik besar, tetapi ada juga konflik kecil yang bisa dikembangkan menjadi konflik besar. Sementara itu, Wakil Ketua I MRP, Ir. Frans Wospakrik, M.Sc dalam materinya menyampaikan bahwa Otsus bagi Papua adalah jalan tengah bagi penyelesaian masalah Papua di waktu yang lalu yang sarat dengan konflik terutama antara rakyat asli Papua dengan Pemerintah Pusat (RI). "Perilaku Pemerintah Indonesia sebelum era reformasi yang sangat otoriter dan represif dialami oleh seluruh bangsa Indonesia dan telah menimbulkan perlawanan rakyat terhadap pemerintahan yang sangat intens dan sarat dengan konflik di seluruh tanah air termasuk Papua." Direktur SKP, Br. J. Budi Hernawan OFM, memaparkan gerakan perdamaian di Papua yang terumuskan dalam gerakan Papua Tanah Damai sejak terbentuknya Foreri pada tahun 1999 hingga sekarang. Kini Kampanye Papua Tanah Damai dimotori oleh Para Pemimpin Agama dan terus menjadi tantangan bagaimana mendaratkan ide tersebut ke tingkat akar rumput sehingga masyarakat awam belum terlibat secara aktif dalam gerakan tersebut.

13 November

- Bpk. Bernardino Regazzoni, Duta Besar Swiss untuk Indonesia melakukan kunjungan ke Polda Papua dan bertemu langsung dengan Kapolda Papua, Irfen Pol. Drs. Max Donald Aer. Menurut Kapolda setelah pertemuan tersebut mengatakan kedatangan Dubes Swiss ke Polda Papua adalah untuk melihat dengan kepala sendiri tentang situasi keamanan di Papua. Dubes yang membawahi seputar masalah tugas-tugas polisi, struktur organisasi maupun masalah-masalah prioritas yang sedang dihadapi. "Terkait masalah prioritas yang sedang dihadapi, saat ini Polda sedang memprioritaskan penanganan masalah konflik antar etnis yang selama ini masih menjadi masalah yang cukup menyulitkan kami dalam upaya penyelesaiannya. Selain itu masalah lain yang menjadi prioritas adalah terkait kasus *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining* dan juga gerakan-gerakan yang mengarah ke separatisme. "Menyikapi adanya gerakan-gerakan dari kelompok separatis, kita kedepankan upaya pendekatan persuasif, sebab akar masalah persoalan itu adalah kesejahteraan yang kurang merata."

26 November

- Anggota Konggres AS, Eny Faleomavega, melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH di Guest House Pemkab Biak Numfor dalam lawatan singkat ke Tanah Papua yang diwarnai dengan pengawalan amat ketat dari polisi.

27 November

- Anggota Konggres Eny Faleomavega melanjutkan kunjungan ke Manokwari dan Timika dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Di bandara Rendani, Manokwari, massa memblokir landas pacu sesaat pesawat mereka hendak terbang dan berhasil memaksa pesawat berhenti. Massa kemudian menyerahkan pernyataan sikap mereka kepada Eni.

3-7 Desember

- SKP Jayapura, FKPPA dan Imparsial Jakarta menyelenggarakan Lokakarya Papua Tanah Damai dan Strategi Penanggulangan HIV-AIDS berbasis Agama di

Hotel Sentani Indah. Lokakarya dibuka oleh Uskup Leo Laba Ladjar OFM selaku Ketua Umum FKPPA dan dihadiri sekitar 30 orang pemimpin agama dari 7 kabupaten dan kota se-Tanah Papua (lihat di www.hampapua.org/skp/indexe.html).

12 Desember

- Diskusi membedah konflik di Timika dan solusinya dari sisi hukum dan keamanan diadakan di Hotel Matoa, Jayapura. Hadir sebagai pembicara di antaranya, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Haryadi Soetanto, Direskrim Polda Papua, Kombes Pol Paulus Waterpauw yang mewakili kapolda Papua, unsur legislatif Wakil Ketua Komisi A DPR Papua, Ramses Wally dan Ketua LBH Papua, Paskalis Letsoin,SH. Pangdam mengingatkan agar dalam penyelesaian suatu konflik jangan sampai berpindah ke tempat lain. Hal ini tentu membutuhkan proses dan itulah pentingnya koordinasi, konsultasi dan komunikasi sehingga konflik dapat diselesaikan secara adil, terhormat dan bermartabat. Sementara Paulus Waterpauw memulai diskusi dengan menuturkan bagaimana pihaknya menghadapi perang yang melibatkan dua kampung (suku), Terkadang pihaknya kesulitan dalam menghadapi keadaan. Sebab ketika masalah ini tidak ditangani dengan hati-hati, maka efeknya akan lebih fatal lagi. Sedangkan Paskalis Letsoin mengungkapkan adanya situasi yang terkadang melegitimasikan keadaan sehingga aparat ditempatkan pada posisi yang sulit dan sulit mengambil tindakan. Paskalis juga menambahkan soal sulitnya komunikasi antara aparat dengan masyarakat akibat keduanya sering saling mencurigai. Sementara Ramses Wally mengaku dengan pernyataan Pangdam akan perlunya dibangun komunikasi, konsultasi dan koordinasi. Ia menambahkan dalam menyelesaikan persoalan di Timika harus dicari akar persoalannya, artinya harus dilihat dulu sejak awal, yakni proses ketika kontrak pertama Freeport ditanda tangani yang ketika itu situasi di Papua masih belum jelas. Akibatnya masyarakat merasa diabaikan sehingga terjadi perang suku.

26 Desember

- Hetty Tokoro tokoh perempuan dari kampung Yoboi, Sentani Kabupaten Jayapura meminta pemerintah Kabupaten Jayapura segera mengeluarkan peraturan daerah (Perda) soal minuman keras (miras). Desakan tersebut terkait dengan peredaran miras yang begitu bebas sehingga berdampak kurang baik bagi masyarakat.

E.Aspirasi 'M'(erdeka)

1 Oktober

- Joe Collins dari AWPA Sydney menyatakan jika Forum Pasifik bicara mengenai persatuan dan kesamaan visi tetapi masalah Papua tidak dihiraukan maka komitmen itu tidak ada artinya. "Papua adalah masalah regional. Forum Pasifik dapat menjadi bagaikan Uni Eropa di Pasifik Selatan. Forum itu dapat mencakup masalah keamanan. Maksudnya untuk membantu semua penduduk Pasifik dan Papua yang adalah penduduk Melanesia. 1,8 juta orang Melanesia yang ambil bagian dalam Forum Pasifik sehingga seharusnya mereka memasukannya dalam agenda pembicaraan".

2 Oktober

- Koalisi untuk Pembebasan Nasional Papua menginginkan referendum bagi penentuan nasib sendiri dan mengakhiri pendudukan militer di Papua serta pelanggaran HAM yang berkepanjangan. Pihaknya juga menginginkan agar lembaga donor dan wartawan asing diizinkan masuk ke Papua tanpa ada pembatasan.

9 Oktober

- Jaringan Solidaritas HAM Selandia Baru mendesak PM Selandia Baru, Helen Clark, untuk mengangkat suara bagi rakyat Papua dalam pertemuan Forum Pasifik. Seruan ini didukung oleh LSM lain seperti Pax Christi, Gerakan Damai Aotearoa dan Christian World Service.

15 Oktober

- Joe Collins dari *Australia West Papua Association (AWPA)* Sydney, Australia, menyatakan, "Karena Australia telah menandatangani Perjanjian Lombok, dapat dinantikan bahwa Australia akan terus berusaha untuk menyingkirkan Papua dari agenda. Tetapi diharapkan Para Pemimpin Pasifik termasuk PM Selandia Baru akan membicarakan masalah HAM di Papua. Hendaknya diingat dengan baik bahwa Papua selalu menjadi bagian dari masyarakat Pasifik. New Guinea dulu adalah anggota dari Komisi Pasifik Selatan, cikal bakal Forum Pasifik yang ada sekarang".

8 November

- Ketua DPR Papua, Drs. John Ibo, MM, dalam kegiatan rapat dengar pendapat Komisi A DPR Papua di Swiss-Bel Hotel Jayapura mengatakan, "Upaya DPRP untuk pelurusan sejarah mutlak dilakukan karena itu adalah instruksi dari Undang- Undang Otsus. Tetapi jangan salah mengerti, KKR dilakukan dalam kerangka NKRI. John Ibo menuturkan, selama ini rakyat Papua selalu berpikir bahwa pelurusan sejarah yang akan dilakukan tidak dalam konteks NKRI karena menganggap pelurusan sejarah selalu berkaitan erat dengan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di tahun 1969 silam.

28 November

- Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH mengatakan rencana perayaan 1 Desember tidak perlu dilakukan, sebab tidak ada perayaan tanggal dalam kalender nasional. Jika 1 Desember tersebut berkaitan dengan kemerdekaan, maka sebenarnya orang Papua sudah merdeka, Dengan Otsus Papua dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Sementara itu Pangdam XVII/Cenderawasih menegaskan bahwa TNI akan selalu siap siaga dalam operasionalnya dan siaga dalam mendukung tugas Polri. "Jadi hakekatnya TNI selalu siaga untuk memberikan pengamanan." Kapolda Papua Irjen Drs. Max Donal Aer juga menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan tetap tenang. "Meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu apapun." bagi yang melanggar aturan atau Undang-Undang yang berlaku di Negara ini kita terapkan sanksi secara tegas. Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djoenso menegaskan, jika hendak melakukan kegiatan secara terbuka dan di tempat umum maka harus ada surat pemberitahuan ke Polresta Jayapura. "Jangan buat kegiatan dengan semaunya sendiri. Kami tidak melarang ibadah, tetapi jangan sampai ibadah itu digunakan untuk kepentingan tertentu."
- Bupati Jayapura, Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM mengharapkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura untuk tidak terprovokasi isu atau ajakan-ajakan yang melanggar aturan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama menyangkut dengan adanya isu-isu menyangkut peringatan 1 Desember. "Saya menghimbau seluruh masyarakat di 19 distrik, 127 kampung dan 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Jayapura untuk tidak terpengaruh melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri."

30 November

- Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yoboisembut mengatakan perayaan 1 Desember tetap dirayakan. Hanya saja soal tempat yang semula direncanakan di Taman Imbi Jayapura dibatalkan dan dialihkan ke Pendopo Alm. Theys di Jl. Bistir Pos Sentani. Karena tidak mendapat izin keramaian dari Kepolisian Resort Jayapura, dirinya menegaskan, "Tidak ada pengibaran Bintang Kejora. Jika toh ada yang mengibarkan itu di luar skenario kami dan merupakan tanggung jawab oknum yang bersangkutan."
- Kalapas Abepura, Johan Yarangga, mengatakan ketatnya penjagaan di lingkungan kalapas dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti pengibaran Bendera Bintang Kejora oleh narapidana kasus makar. "Kami tidak mau kecolongan lagi seperti tahun-tahun lalu, sehingga kami terpaksa memperketat penjagaan".
- Koordinator KontraS Papua, Harry Maturbongs mengatakan, penanganan 1 Desember itu tidak cukup hanya dilihat dari sudut pandang politiknya, namun berbagai persoalan untuk memperoleh rasa keadilan bagi masyarakat juga perlu perhatian serius pemerintah. Pelanggaran HAM berat yang dimaksud antara lain, pelanggaran HAM berat Abepura tahun 2000, kasus pembunuhan Theys H. Eluay, Kasus Wasior 2001, kasus pasca pembobolan gudang senjata wamena, kasus penghilangan orang secara paksa dan perlu solusi terhadap penyelesaian penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di Papua.

1 Desember

- Aksi pengibaran Bendera Bintang Kejora terjadi di Jalan Baru, Kota Timika. Enam orang ditangkap dan dituduh makar: **Jakobus Pigay, Melki Katanggama Magai, Polce Aim Magai, Suniem Ogol Magai, Yuli Gwijangge, Puniel Nirigi**.
- Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs Max Donald Aer melalui Direktur Reserse dan Kriminal (Direskrim) Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Paulus Waterpauw, membenarkan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Jl. Baru, Timika yang dilakukan masyarakat. Pihaknya selaku aparat kepolisian akan memroses tegas oknum pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. "Jajaran Polda Papua tetap *memback-up* proses hukum atas kasus tersebut. Sementara itu, Dandim 1710 Mimika Letkol Inf. Trie Soesono mengatakan, pihaknya siap membantu tugas kepolisian. "Sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh jajaran Polres".
- Aksi pengibaran bendera tersebut disesali oleh Yosepha Alomang, Direktris Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak) di Timika. "Kalau mau memperingati 1 Desember jangan mengibarkan Bintang Kejora. Jangan peralat dan korbankan masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa".
- Peringatan 1 Desember yang dipusatkan di Pendopo Alm. Theys Hiyo Eluay di Jl. Bis Tir Pos Sentani tidak menimbulkan insiden menonjol, apalagi pengibaran Bintang Kejora. Ketua Dewan Adat Mamta, Forkorus Yoboisembut mengatakan dalam sambutannya "Orang selama ini bicara soal sejahtera, tetapi modelnya bagaimana, buktinya masih banyak rakyat yang protes dengan kebijakan pemerintah". Lalu mengenai perayaan 1 Desember dia berkata "Papua telah merdeka dengan bertolak dari piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tertanggal 10 Desember 1948 tentang hak asasi manusia dimana pasal 15 ayat 1 berbunyi tentang setiap orang berhak menentukan bangsanya sendiri dengan demikian kita juga harus bisa menentukan kemerdekaan itu". Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjend) Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Al Hamid mengatakan

"Situasi di Papua saat ini aman dan damai karena kami bertekad akan menempuh cara damai yakni dengan kongres". Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djoenso menyatakan, pihaknya sangat merasa bersyukur karena masyarakat mau mengikuti himbauan dan mentaati aturan hukum yang berlaku. "Untuk wilayah kota Jayapura, tidak ada pengibaran bintang kejora termasuk yang ditaruh di pohon-pohon juga tidak ada. Sementara itu Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Max Donald Aer menyatakan, secara umum situasi di wilayah hukum Polda Papua cukup kondusif. "Meski ada kejadian di beberapa tempat seperti di Timika, Yapen dan Manokwari, namun hal itu tidak berpengaruh pada stabilitas keamanan."

4 Desember

- Kabid Humas Polda Papua, Kombes Agus Rianto mengatakan bahwa sampai saat itu kasus pengibaran Bintang Kejora masih ditangani di Polres Mimika. Atas kasus itu pihak kepolisian akan menjerat para pelaku pengibaran bendera bintang kejora dengan ancaman pasal 106-107 KUHP tentang makar dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang penggunaan senjata api dan bahan peledak. Saat ini Polres Mimika masih menahan 6 orang dari 36 orang yang ditangkap pada peristiwa pengibaran Bendera Bintang Kejora 1 Desember. Keenam orang tersebut adalah **Jakobus Pigay, Melki Katanggamen Magai, Polce Aim Magai, Suniem Ogol Magai, Yuli Gwijange, Puniel Nirigi.**

5 Desember

- Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Max Donald Aer mengatakan bahwa tersangka kasus pengibaran Bendera Bintang Kejora di Timika bertambah 1 lagi, sehingga semuanya menjadi 7 orang. Sementara 4 orang masuk daftar pencarian orang (DPO) masih dicari karena jelas-jelas mereka telah melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur makar.

14 Desember

- Kapolda Papua, Irjen Pol Max Donald Aer mengatakan, "Tidak ada pengibaran Bendera Bintang 14, yang diklaim merupakan Kemerdekaan Negara Melanesia Barat". Kapolda meminta agar masyarakat tidak membesar-besarkan hari tersebut.

26 Desember

- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, John Rumbiak, SH, mengatakan, "Sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka keinginan pihak-pihak yang ingin mengangkat simbol-simbol yang pernah diusulkan oleh MRP tentang bendera Bintang Kejora, lagu 'Hai Tanahku Papua', dan lambang Burung Mambruk bakal sulit kesampaian".

F. Pemekaran vs Otsus

1 Oktober

- Dino Kusnadi, Jubir Kedubes RI di Australia, yang baru-baru berkunjung ke Papua bersama dengan 35 orang lainnya guna melihat perkembangan pelaksanaan Otsus menilai bahwa laporan-laporan kelompok pembela HAM bahwa Otsus gagal senyatanya jauh dari kebenaran. Menurutnya hubungan antara pemerintah daerah dan pusat berjalan efektif dan karenanya, layanan publik yang lebih baik mampu menjangkau masyarakat.

19 Oktober

- Wakil ketua II DPR Papua, Paskalis Kossy S.Pd. MM, mengatakan mendukung pemekaran-pemekaran yang dilakukan di Papua. Ia menilai setiap provinsi di Tanah air masing-masing memiliki kondisi geografis dan karakteristik alam yang berbeda-beda sehingga tidak boleh disamakan dengan daerah lain. "Selama ini yang ada di pedalaman hanya aparat TNI atau Polri, hanya itu yang dikenal oleh rakyat". Paskalis menambahkan, pemahaman terhadap TNI atau Polri dengan aparat pemerintah daerah tentunya berbeda, meskipun ada juga sebagian aparat TNI yang ikut memberikan pendidikan kepada rakyat di kampung-kampung. Karena itu kehadiran pemerintah yang lebih dekat dengan rakyat di daerah melalui pemekaran kabupaten sangat dibutuhkan oleh rakyat khususnya dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada rakyat.

27 Oktober

- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, John Rumbiak mengatakan "Kami telah mengajukan Raperda kepada Dewan untuk dibahas." Dari 16 Raperda yang diajukan 9 Raperda telah disetujui pada masa persidangan 2005-2006. Di antaranya Perda tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat MRP, larangan pemasukan hewan penular rabies ke Papua, Perda tentang pembangunan pendidikan di Papua; sementara itu 7 Raperda yang sudah disampaikan ke dewan tetapi belum dibahas melalui persidangan diantaranya Perda Perekonomian berbasis kerakyatan, perlindungan dan pembinaan kebudayaan asli Papua, pelayanan kesehatan, gizi penduduk, pelestarian lingkungan dan HIV-AIDS.

31 Oktober

- Belum ditetapkannya sejumlah rancangan Perdasus yang menyangkut hal-hal dasar orang asli Papua yang sampai saat ini mandeg di tingkat eksekutif sebagaimana diungkapkan Ketua MRP, Agus A. Alua, MTh. Menurut Wagub, Alex Hesegem, SE, sulit juga bagi eksekutif untuk bekerja tanpa acuan yang jelas yang diatur dalam PP sebagai penjabaran dari pasal-pasal yang ada didalam UU no. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Provinsi Papua. "Jadi mesti ada PP baru yang dapat dijadikan acuan untuk menjelaskan tentang aturan pelaksanaan dari pasal-pasal yang ada di dalam UU itu untuk kita bisa buat Perdasus.

1 November

- Ketua Tim Evaluasi 5 tahun Otsus Papua, Drs. Agustinus Fatem, MT mengatakan, secara umum, ada beberapa parameter yang dipakai dalam penelitian itu, salah satunya adalah konsistensi kebijakan. Dari hasil studi yang dilakukan, ditemukan indikasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten telah melakukan inkonsistensi kebijakan. "Semua disebabkan karena Pemprov menjabarkan Otsus tanpa satu kebijakan administratif yang berupa perdasus dan perdasi."

2 November

- Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua, Drs. Alex Hesegem, SE menyambut positif evaluasi Otsus selama 5 tahun itu dinyatakan dengan jujur baik keberhasilannya maupun kekurangannya. Evaluasi ini dapat dilakukan secara formal maupun akademisi, petugas pemerintah dan masyarakat. Kalau ternyata hasilnya belum baik, maka akan dicari solusinya dengan mempersiapkan program ke depan sehingga kekurangan itu dapat ditutupi.

3 November

- Plt. Bupati Jayawijaya, Nikolas Jigibalom, S.Sos mengatakan di sela-sela acara konser musik band Bagi Orang-Orang Muda Papua (BOOMP), di Pantai Hamadi

Jayapura mengatakan, “Untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada Masyarakat Kabupaten Jayawijaya, sebagai kabupaten induk yang baru saja dimekarkan Kabupaten Tolikara, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang, kini direncanakan akan dimekarkan lagi menjadi empat kabupaten yakni, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Duga. Baru-baru ini Gubernur Provinsi Papua dan Bupati Jayawijaya dipanggil Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan pemekaran di Kabupaten Jayawijaya”.

4 November

- Ketua Majelis Rakyat Papua, Agus Alue Alua, mengatakan setelah Papua diberi Otonomi Khusus oleh Pemerintah Pusat, anehnya Jakarta malah membuat kebijakan lain seperti membentuk Provinsi Irian Jaya Barat (IJB). Kemudian pelaksanaan perdasu dan perdasus tidak didukung dengan Peraturan Pemerintah (PP) sehingga belum ada satu pun perdasu yang di tetapkan.

5 November

- Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Drs. Blasius Pakage mengatakan "Dalam dua tahun terakhir jumlah kampung dan Distrik di Papua meningkat tajam." tahun 2005 lalu jumlah kampung di Papua hanya berkisar 2545 kampung dan 190 distrik pada 20 kabupaten/kota di Papua. Namun pada tahun 2007, jumlahnya meningkat mencapai 3317 kampung, 89 kelurahan, serta 282 distrik. Ironisnya pemekaran kampung yang dilakukan itu umumnya ada yang tidak melalui kajian yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga seringkali pihaknya disodori data kampung. Namun bagaimana pembentukan kampung itu, pihaknya juga tidak mengerti.

22 November

- Wagub Papua Alex Hesegem, SH menanggapi adanya sebagian pihak yang menilai bahwa selama 6 tahun Otsus diimplementasikan di Bumi Cenderawasih saat ini masih bersifat simbolik, "Yang menilai itu siapa, itu bohong, tidak boleh menilai Otsus begiu."

30 November

- Pertemuan Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan tokoh-tokoh agama yang di pimpin Wakil Ketua Pokja Agama MRP Pdt. W. F. Rumsawir, S.Th, menghasilkan 5 kesepakatan yaitu: **pertama** pertemuan antara masyarakat adat perempuan dan agama dalam rangka tanggung jawab pelaksanaan Otsus selama 6 tahun yang difasilitasi MRP. Pertemuan yang dimaksud berbasis masyarakat asli Papua. **Kedua** mendesak Gubernur Papua menandatangani Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) penerimaan dan pengelolaan dana Otsus. **Ketiga** mendesak DPRD dan gubernur membahas dan menetapkan 10 Perdasus yang dianggap mendesak. Masing-masing kewenangan khusus dalam rangka pelaksanaan Otsus di Papua, lambang daerah, hak-hak dasar orang asli Papua, lambang daerah, hak-hak dasar orang asli Papua, tugas dan kewenangan MRP, pengelolaan sumber daya alam (SDA) Papua dan kesatuan kultural orang asli Papua, masyarakat hukum adat Papua, kedudukan keuangan dan protokoler pimpinan dan anggota MRP dan penataan tanah adat di Papua. **Keempat**, perlu pemisahan penganggaran dana Otsus dari APBD Provinsi Papua dan kabupaten/kota. **Kelima** suara kenabian gereja dan agama diwujudkan dengan penyampaian aspirasi masyarakat asli Papua kepada pemerintah pusat maupun dunia internasional.

5 Desember

- Enam Kabupaten di Pegunungan Tengah yaitu Kabupaten Puncak Papua, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Memberamo Tengah melalui DPR-RI Komisi II telah memutuskan pembentukan enam daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Papua Khususnya di Wilayah Pegunungan Tengah (rincian undang-undang dapat dilihat dalam: www.hampapua.org/skp/hukum.html).

6 Desember

- Enam kabupaten hasil pemekaran disahkan setelah disetujui oleh 10 fraksi yang ada di DPR-RI. Pengesahan dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR-RI, E. Mangindaan dan Menteri Dalam Negeri, Mardiyanyo. Dalam pengesahan ini hadir pula tiga bupati dari kabupaten induk. Ketiganya adalah Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe, S.IP, Bupati Jayawijaya, Nikolas Jigibalom, S. Sos, dan Bupati Paniai Naftali Yogi, S.Sos. enam kabupaten yang disahkan yakni Kabupaten Puncak Papua, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Duga, Kabupaten Memberamo Tengah.

13 Desember

- Bupati Nabire, Drs. Anselmus Petrus Youw, mengatakan Badan Legislasi DPR-RI dikabarkan sudah menurunkan RUU tentang Provinsi Papua Tengah. "Pada saat kami memperjuangkan pemekaran Kabupaten Dogiyai, kami juga mendapatkan informasi soal Provinsi Papua Tengah. A.P Youw mengklaim, proses pengaktifan Papua Tengah telah mendapatkan dukungan dari 7 Ketua DPRD dan 4 Bupati dari 7 wilayah di Papua Tengah. "Dukungan itu telah dilakukan dalam satu surat dukungan pernyataan yang menyatakan bahwa Provinsi Papua Tengah harus diaktifkan kembali".

14 Desember

- Ketua DPRD Kota Jayapura, Drs. Theopilus Bonay, menegaskan "Dana otonomi khusus tidak boleh untuk membangun gedung pemerintah, atau kebutuhan aparatur lainnya. Semua harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat langsung".
- Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Daerah (Bikda) Provinsi Papua, Fred Manufandu, SH dalam sosialisasi Perdasi/Perdasus tentang pembangunan pendidikan di Provinsi Papua, di Aula Bikda Provinsi mengatakan, Pilar-pilar masyarakat Indonesia baru adalah manusia yang terdidik dan berbudaya. Gubernur mengakui, sampai saat ini data base mengenai Papua masih belum ada. "Selama ini hanya laporan-laporan berkala yang dibuat setiap bulan oleh lembaga dan instansi baik pemerintah maupun swasta. "Untuk melakukan hal ini tidak segampang yang dibicarakan, sebab kita harus memiliki SDM yang siap pakai."

28 Desember

- Dosen FISIP Uncen, Marinus Yaung, S.Ip, mengatakan perubahan politik Internasional untuk Papua akan ada perubahan dalam implementasi Otsus Papua, dengan adanya pengawasan dari anggota kongres Amerika akan memberikan tekanan politik yang kuat kepada pemerintah Indonesia untuk serius melaksanakan Otsus di Papua, karena beberapa anggota kongres Amerika akan melakukan lobi-lobi politik untuk memajukan isu-isu di Papua ke dalam agenda PBB dengan langkah awal melalui RUU Fiskal dan Kebijakan Luar Negeri HR 2601.

II. HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

A. Hak atas Pendidikan

4 Oktober

- Anggota Komisi E DPRD Yosephina Pigay, S.Sos mengatakan pada RAPBD tahun anggaran 2008 mengusulkan perlu diberikan beasiswa kepada orang asli papua untuk di sekolahkan ke luar negeri pada setiap jenjang strata pendidikan, hal ini di sampaikan pada saat menyampaikan laporan Komisi A DPRD terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Papua tahun 2007 dan RAPBD 2008 pada Rapat Paripurna DPRD di ruang sidang DPR Papua.

3 November

- Kepala Subdin Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas P dan P Kabupaten Jayapura, Septinus Jeri Setouw, S.Sos mengungkapkan sampai saat ini masih banyak penduduk di Kabupaten Jayapura, yang buta aksara. Kebanyakan memang di Kampung-kampung, meski di wilayah kota juga ada yang buta aksara. Dari data terakhir jumlah penduduk yang buta aksara ini mencapai 9.544 jiwa. Dibanding jumlah penduduk Kabupaten Jayapura sebanyak 112 ribu jiwa lebih, jumlah penduduk sebanyak 9.544 jiwa ini masuk dalam kategori tinggi. Penyebabnya adalah banyaknya penduduk buta aksara ini dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan khususnya di daerah pedalaman.

6 November

- Dosen Universitas Cenderawasih (Uncen) Thoby Wakarmamu, MBA mengatakan rencana Pemerintah Kota Jayapura membayar uang Lauk Pauk (LP) bagi PNS sangat disambut positif, tapi harus dibayarkan secara menyeluruh kepada PNS sampai dan juga guru-guru PNS.

8 November

- Sekitar pukul 10.30 WIT 300an mahasiswa STIE Port Numbay, melakukan demo damai di kampus STIE Port Numbay yang dipimpin Max Sirami, mengatakan mereka menuntut keterbukaan dan transparansi menyangkut bantuan beasiswa dan bantuan studi akhir setiap tahun bagi mahasiswa

9 November

- Walikota Jayapura Drs. M.R Kambu, M.Si di Aula Kantor Walikota mengatakan rencana pengusulan pembebasan biaya sekolah oleh DPRD Kota Jayapura pada tahun 2008 tidak bisa dilakukan karena akan mengurangi dana dari sektor lain.

27 November

- Anggota Badan Standar Nasional Departemen Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dalam sosialisasi Ujian Nasional kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran se-Provinsi Papua di Aula Dinas Pendidikan dan Pengajaran se-Provinsi Papua mengatakan Ujian Nasional (UN) bagi SD/Mi/SDLB, SMP/MTs/SMPLN, SMA/MA dan SMK tahun ajaran 2008 mendatang, cukup berat dengan nilai standar 5,25 setiap mata pelajaran yang diujikan hal ini sesuai dengan amanat PP 19 tahun 2008 tentang standar kelulusan nasional dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.

B. Hak atas Kesehatan

14 Oktober

- Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari menyatakan usai lebaran akan mengirim tim khusus ke Wamena dan Mulia. Tim ditugasi untuk mendata dan meninjau langsung kondisi kesehatan masyarakat di wilayah itu tanpa melibatkan kepala dinas kesehatan setempat. "Tim harus meninjau langsung rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta tenaga kesehatan dan kondisi kesehatan warga dengan bertanya langsung kepada mereka," kata Siti saat menerima Kepala Suku Besar Lembah Balim, Distrik Wamena, Abdur Rahman Kossay. Rencananya, hasil temuan tim khusus akan menjadi dasar pelaksanaan program itu. Pemerintah pusat akan mengirim tenaga pengajar, peralatan, dan obat-obatan untuk menunjang pelatihan itu.

16 Oktober

- Hasil penelitian Departemen Kesehatan, KPAN, KPAD, dan BPS tentang HIV-AIDS menunjukkan bahwa prevalensi di Papua 2,4 % lebih tinggi daripada rata-rata di wilayah lain di Indonesia yang hanya mencapai 0,2%. Laporan itu juga menunjukkan bahwa penyakit tersebut sudah menyebar ke semua tempat di Papua. Laporan lain dari Biro Peringatan Dini PBB menyatakan bahwa 74% penderita HIV-AIDS adalah penduduk asli Papua.

19 Oktober

- Pusat Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) Sanggeng milik pemerintah Kabupaten Manokwari libur selama 10 hari dalam menyambut hari raya lebaran. Akibatnya banyak pasien yang biasa berobat di puskesmas tersebut tidak terlayani. Untuk mendapat pelayanan kesehatan warga terpaksa harus berobat ke rumah sakit swasta yang biayanya relatif mahal. Bahkan ada warga yang sementara sakit tetap menunggu dibukanya puskesmas kemudian berobat di puskesmas tersebut.

22 Oktober

- Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKP) Kota Jayapura, Luhulima Siratjin mengatakan, pengelolaan sampah dan kebersihan di kota ini terkadang dianggap sepele, padahal cukup sulit karena disebabkan beberapa faktor. Diantaranya, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih sangat rendah, minimnya fasilitas yang ada seperti truk atau armada sampah, *kontainer* dan lainnya. Selain permasalahan tersebut dirinya mengakui proses pengangkutan sampah belum efektif. "Terkadang ada juga petugas yang belum menghafal rute pengangkutan sampah. Lanjutnya pihaknya saat ini dilengkapi dengan 280 petugas, baik petugas harian maupun petugas lepas, 27 unit truk, 54 unit bak *kontainer*, 67 unit bak bukan kontainer. Petugas kebersihan terdiri dari sopir 27 orang, buruh sampah 96 orang, operator dozer dan ekskavator 4 orang, pengawas TPS 23 orang, buruh sapu 112 orang, buruh babat 24 orang. Menurutnya petugas sudah cukup termasuk sarana dan prasarana sudah memadai; hanya saja faktor cuaca sering menjadi kendala.

23 Oktober

- Juru Penyakit di Puskesmas Amban, Serui, Patani Parjala, mengatakan, saat ini puskesmas sedang menangani 16 pasien penyakit kusta. Jumlah tersebut bisa saja bertambah, sebab bisa saja ada penderita namun enggan untuk berobat ke puskesmas atau rumah sakit. 16 pasien yang ditangani termasuk sudah parah, sehingga penanganannya sangat serius. "Saya harus serius tangani mereka karena penyakitnya sudah parah, kalau pasien itu tidak datang saya harus ke rumah mereka untuk mengantarkan obatnya, sebab kalau tidak, pengobatan yang lalu akan sia-sia."

31 Oktober

- Ketua Tim Penertiban Makanan dan Minuman (Mami) Beracun Tingkat Kota Jayapura, Musa Jouwe, SH, MSi, mengatakan, hasil penertiban makanan dan minuman yang dilakukan pihaknya pada sejumlah pasar penyangga, pasar sentral dan supermarket kini sudah diperiksa Balai POM dan Laboratorium Dinas Peternakan Provinsi Papua, dan dari hasil pemeriksaan itu didapati makanan berupa mie basah mengandung boraks (zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan). Diterangkannya mie basah yang mengandung boraks itu ditemukan di Pasar Paldam, dan Pasar Sementara PTC Entrop, sementara Pasar Youtefa Kotaraja dan sejumlah tempat lainnya dinyatakan bebas dari bahan kimia.

2 November

- Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Jayapura, Binton Nainggolan mengatakan, berdasarkan Survey Terpadu HIV dan Perilaku (STHP) Provinsi Papua terdapat 5000 orang di kota Jayapura terinfeksi HIV. Saat ini Kota Jayapura memiliki 38 konselor yang tersebar di 4 Puskesmas dan 5 rumah sakit yang ada di kota Jayapura. Jumlah tersebut belum efektif untuk memeriksa seluruh penduduk kota Jayapura.

3 November

- Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, drg. Suyono Angkasa, MPH, mengatakan sesuai data yang ada pada pihaknya pada 2007 ini, sebanyak 421 balita terserang atau mengalami gizi buruk.
- Bupati Keerom, Celcius Watae, sedih melihat puluhan anak tanpa baju dan perut buncit bersama orang tuannya saat menjemputnya di lapangan Dusun Kesnar, Senggi, Keerom. Mereka terlihat sangat berharap agar bupati segera mengubah kehidupan mereka yang serba miskin dan jauh dari taraf kesejahteraan. Selain banyak anak yang kekurangan gizi buruk, juga banyak anak yang tidak mengecap pendidikan seperti layaknya daerah lain. Kondisi perekonomian mereka pun sangat memprihatinkan. Belum ada petugas kesehatan dan petugas pemerintahan, padahal sudah ada bangunan puskesmas dan pos pemerintahan di daerah tersebut.
- Musibah bencana banjir pada bulan Maret 2007 lalu, selain merusak jalan dan jembatan serta perumahan penduduk di sekitar Sentani, jaringan pipa PDAM juga mengalami kerusakan termasuk sumber air di kaki Gunung Cyclops.

6 November

- Ketua Komisi C DPR Papua, Yan Ayomi, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan mengapa pihak RSUD Dok II Jayapura memberlakukan tarif pengobatan yang begitu mahal bagi penduduk asli Papua di era Otonomi Khusus (Otsus)

12 November

- Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-43 di Dinas Kesehatan Provinsi Papua diwarnai demo damai mahasiswa Poltekes Jayapura. Demo yang dilakukan sekitar 20an orang ini merupakan puncak kekecewaan terhadap Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang memberikan obat sangat terbatas pada kegiatan bakti pelayanan sosial mahasiswa Poltekes Jayapura beberapa waktu lalu di Distrik Kemptuk Gresik, Kabupaten Jayapura. Koordinator pendemo Yulianu Dwa mengatakan, awalnya Dinkes Provinsi Papua bersiap akan membantu obat pada pengobatan masal yang akan dilakukan pihaknya di 5 kampung di Distrik Kemptuk Gresik. Namun hanya satu kampung yang dapat dilayani, yakni Kampung Skori karena dana terbatas.

- Meski upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kabupaten Merauke khususnya yang berada di kampung-kampung terus dilakukan, namun ada sekitar 60 kampung yang belum ada petugas kesehatan. Hal tersebut diungkapkan kepala Dinas Kabupaten Merauke drg. Josef Rinta Riatmaka, M.Kes. terbatasnya tenaga kesehatan tersebut dikarenakan formasi yang disiapkan Pemerintah Pusat dalam setiap formasi untuk tenaga kesehatan sangat terbatas. Dari 160 kampung yang ada di Merauke, jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di kampung-kampung sebanyak 92 orang.

25 November

- Polsekta KP3 Laut Jayapura berhasil mengamankan miras ilegal jenis Cap Tikus (CT) sekitar 100 liter yang di bawa seorang ibu bernama Merry M yang datang dari Ambon menggunakan kapal KM Doloronda. Kapolsekta KP3 Laut Jayapura AKP Bambang Irawan mengatakan, pihaknya kembali mengingatkan, operasi Miras ilegal akan terus digalakkan, sebab dengan mencegah masuknya Miras ilegal di Kota Jayapura, akan berpengaruh pada berkurangnya tindak kriminalitas yang disebabkan oleh Miras.

27 November

- Tingginya angka kasus HIV-AIDS di Papua yang saat ini tembus angka 3.434 kasus, tak lain pemicu utamanya adalah lewat seks (hubungan intim), sementara penyebar utamanya ialah laki-laki. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Provinsi Papua, drh. Constant Karma. Menurutnya laki-laki adalah pengidap HIV-AIDS terbanyak yakni mencapai 1.774 kasus. Selebihnya adalah perempuan 1.602 kasus.

| Data HIV-AIDS Menurut Kelompok Faktor Berisiko | | |
|---|-----------------|--------|
| No. | Faktor Resiko | Jumlah |
| 1. | Heteroseks | 3188 |
| 2. | Homoseksual | 11 |
| 3. | Seksual | 21 |
| 4. | Perinatal | 58 |
| 5. | O.U | 2 |
| 6. | Transfusi | 4 |
| 7. | Hemofilia | 0 |
| 8. | Tidak diketahui | 150 |
| Total | | 3434 |
| **Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Papua | | |

- Wakil Bupati Zadrak Wamebu mengatakan berdasarkan laporan terakhir yang diterima dari dinas kesehatan sampai September 2007, HIV-AIDS di Kabupaten Jayapura telah mencapai 202 kasus, yang terdiri dari 122 kasus HIV dan 80 kasus AIDS, yang di antaranya meninggal 43 orang. Hal itu dikatakan dalam kegiatan penanggulangan narkoba dan Penyakit Menular Seksual (PMS) di Gunung Merah, Sentani.

29 November

- Ketua Pokja Agama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MRP), Pdt. Benyamin Yantewo mengatakan pihaknya akan berdialog langsung dengan para tokoh agama seputar Implementasi Otonomi Khusus (Otsus), persoalan minuman keras (Miras) dan Kasus HIV-AIDS. "Banyak hal yang harus dibicarakan terkait kondisi Papua. Kami melihat bahwa tokoh agama sangat berperan sebab mereka berkomunikasi langsung dengan masyarakat di lapangan. Mereka mengalami

apa yang dialami masyarakat". Ia menambahkan "Bicara soal Miras dan HIV-AIDS bagi generasi muda tentunya tidak terlepas dari peran tokoh agama. Justru kami menilai bahwa tokoh agama lebih mudah didengar daripada orang lain".

- Kapolres Boven Digoel Kompol. J. Roland Simamora, SIK, membenarkan puluhan botol minuman keras berhasil disita dalam razia gabungan antara Polres Boven Digoel dan Kodim 1711 diatas kapal KM. Terumbuk. Adapun jenis minuman keras yang disita yaitu 83 botol Sopi yang dikemas dalam botol aqua, 84 botol sopi merah, dan 35 botol sopi putih.
- Ketua Penyelenggara Debat Pemuda dan Mahasiswa, Adi Musliman, mengatakan kegiatan Debat Pemuda dan Mahasiswa dimaksudkan untuk mencari ide-ide, wacana alternatif solusi dari pemuda dan mahasiswa dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Merauke. "Kegiatan ini juga untuk menyemarakkan sekaligus mengkampanyekan informasi tentang HIV-AIDS".

30 November

- Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua, drh. Constant Karma mengatakan "Terkait dengan momen hari AIDS se-dunia, mengajak seluruh masyarakat di Papua untuk peduli dengan HIV-AIDS". Saat ini jumlah kasus HIV-AIDS di Papua telah menembus 3434 kasus. Angka ini sudah memasuki siaga I sehingga semua pihak harus peduli dengan ancaman ini.

4 Desember

- Kepala Dinas Kesehatan dr. Esterlina Ayomi, MKes mengatakan, jumlah penderita kusta di Kabupaten Jayapura yang sebelumnya 51 orang, kini bertambah 31 orang lagi, sehingga secara total berjumlah 63 orang yang tersebar di sejumlah distrik.

11 Desember

- Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, drg. Suyono Angkasa, MPH mengatakan untuk meningkatkan penanggulangan HIV-AIDS pada tahun 2008 maka pihaknya akan memaksimalkan Puskesmas yang ada untuk melakukan pemeriksaan awal atau VCT HIV-AIDS. Keenam puskesmas itu di antaranya Puskesmas Hamadi, Imbi, Waena, dan lainnya.
- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drs. Tejo Suprpto, MM dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Asisten II Bidang Aparatur Setda Provinsi Papua, Drs. Hendrik Kaisepo, MM pada pelatihan pelayanan prima bagi tenaga medis di Hotel Numbay mengatakan, "Kenyataan menunjukkan bahwa selama 30 tahun lebih orientasi pelayanan kesehatan belum optimal karena masih menggunakan pendekatan manajemen tradisional yang belum mengedepankan masalah pelayanan".

15 Desember

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Drs. Sefnath Korwa, MS, membenarkan adanya peningkatan kasus diare dalam tiga minggu terakhir. Menurut Sefnat, sejak 24 November hingga 15 Desember, sudah 66 warga yang dirawat akibat diare. Pihaknya mengingatkan masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dan pribadi. "Pencegahan yang paling efektif yaitu dengan perilaku hidup sehat. Kita berharap masyarakat tidak mengonsumsi air minum yang belum dimasak, serta memperhatikan jajanan yang dijual tidak higienis."

19 Desember

- Gina Kourt, dokter ahli bedah mata di RS Anak Sydney, Australia, mengungkapkan rasa optimisnya setelah berhasil melakukan pembedahan mata yang amat sulit terhadap Julian Inarkombu (2 th), seorang penghuni kamp pengungsi Papua di PNG, yang hampir kehilangan daya penglihatannya karena penyakit *cryptophthalmos*. Dia berhasil diterbangkan ke Sydney berkat amal seorang yang tak mau dikenal yang menyumbangkan dana senilai A\$10.000 (sekitar Rp. 80.000.000).

21 Desember

- Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, drg. Sudjono Angkasa, MPH di puskesmas imbi mengatakan selama Bulan Desember ini telah ditemukan kasus demam berdarah dengue (DBD) di kota Jayapura, sehingga dirinya menghimbau masyarakat melakukan pola hidup sehat untuk mencegah resiko terkena DBD.
- Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura, Drs. Yacob Ingratubun, mengatakan pihaknya mengharapkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat harus di tingkatkan, khususnya puskesmas-puskesmas di Kota Jayapura oleh Pemerintah Kota Jayapura dan dinas terkait di jajaranya.

30 Desember

- Ketua Rukun Keluarga Jayawijaya, Philipus Halitopo, mengatakan dirinya mempunyai data yang dihimpun oleh Rukun Keluarga Jayawijaya di Jayapura sepanjang tahun 2007. Tercatat sebanyak 77 orang warga dari Pegunungan Tengah meninggal akibat mengkonsumsi minuman keras (miras).

C. Kesejahteraan Umum

15 Oktober

- Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Drs. Husein Tofer mengatakan, penanganan Terminal Pasar Youtefa tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong, tetapi harus menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan semua pihak yang terkait. "Beberapa dinas yang punya urusan di pasar itu, seperti Dinas Trantib Kota Jayapura, Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jayapura, Dinas Pasar Kota Jayapura dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura." Bagaimana penanganan drainase sehingga tidak menimbulkan becek atau genangan air di dalam pasar. Pengembangan terminal masih belum dipikirkan, yang harus dilakukan adalah peningkatan kualitas terminal sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat.

1 November

- Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura, Drs. Yacob Ingratubun, menyayangkan Demo Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Jayapura yang mempertanyakan realisasi pembayaran tunjangan uang lauk pauk (LP) dan tunjangan kinerja. Menurutnya hingga saat ini DPRD Kota Jayapura belum menyetujui plafon anggaran untuk uang lauk pauk tersebut. "Jika anggaran tersebut digunakan untuk menganggarkan uang lauk pauk bagi setiap PNS, maka banyak program pelayanan publik tidak jalan".

28 November

- Polemik tentang besarnya uang lauk pauk bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Jayapura mendapat reaksi keras dari komponen masyarakat. Sekitar 100 an masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Peduli Masyarakat Miskin (KPRM) mendatangi Kantor DPRD Kota Jayapura. Dalam unjuk rasa massa secara tegas meminta dewan dalam pembahasan RAPBD 2008 menolak pemberian uang lauk pauk dan memprioritaskan pengalokasian pos-pos anggaran pelayanan publik. Kebijakan dan tuntutan menaikkan uang lauk pauk

dinilai hanya menguntungkan PNS saja. Pasalnya, PNS yang nota bene tugasnya melayani masyarakat sudah memperoleh berbagai tunjangan dan gaji yang cukup. Misalnya saja tunjangan Papua, gaji 13 dan sejumlah hal lainnya termasuk fasilitas lainnya.

30 November

- Ketua DPRD Kota Jayapura, Theolipus Bonay, MM mengatakan usai penutupan sidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), "Uang lauk pauk bagi PNS sudah ditetapkan dalam APBD 2008, sebesar 5000/orang/hari sehingga totalnya kurang lebih 18 miliar".

1 Desember

- Walikota Jayapura, Drs. M.R. Kambu, M.Si mengatakan, pembayaran uang lauk pauk (LP), akan mengacu pada peraturan walikota, dimana didalamnya mengacu pada peraturan walikota berupa surat keputusan (SK) Walikota. Penyaluran uang LP akan dilakukan pada setiap akhir bulan dan sifatnya tidak seperti gaji. Artinya besaran uang LP disesuaikan dengan kehadiran PNS, dan hal-hal lain. Besar uang LP yaitu Rp. 5000/hari/orang/hari yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemkot kota Jayapura dengan DPRD kota Jayapura.

3 Desember

- Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Drs. Jesaya Udam mengatakan, demi kelancaran pembayaran uang lauk pauk, pihaknya akan mengacu pada aturan yang berlaku. Ditegaskannya sebelum pembayaran uang lauk pauk bagi setiap PNS, terlebih dahulu akan dicek kehadirannya pada absensi.

10 Desember

- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Drs. Yotam Yorgen Fonataba. MM bahwa faktor utama penyebab munculnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kategori anak nakal, anak jalanan dan pekerja seks jalanan dikarenakan faktor ekonomi dan permasalahan intern keluarga. Untuk jumlah anak jalanan hingga akhir tahun 2007 berjumlah 143 orang, pekerja seks jalanan pada akhir 2007 berjumlah 49 orang. Permasalahan lain adalah soal penderita HIV-AIDS yang hingga kini berjumlah 148 orang yang tersebar di 10 distrik di wilayah Sentani Kota.

17 Desember

- Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH dan Bupati Tolikara, John Tabo, menerima penghargaan dari Presiden melalui Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Abdul Rizal Bakri bertempat di Gedung Birawa Hotel Bumi Karsa Kompleks Bidakara Pancoran Jakarta Selatan. Keduanya, Suebu dan John Tabo dinilai oleh pemerintah pusat mampu memberikan kontribusi positif dalam melakukan langkah-langkah konkrit pengurangan jumlah penduduk miskin di Papua yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi.

D. Pengelolaan Sumber Daya Alam

1 Oktober

- Pertamina dan Lukoil, perusahaan minyak besar dari Rusia, menandatangani kesepakatan untuk mengeksplorasi lepas pantai Semai di Provinsi Papua. Dirut Pertamina, Ari Soemarno, menjelaskan, "Kami akan memilih Semai karena potensi cadangan minyak mentah. Tapi kami belum tahu seberapa besar cadangan itu tapi jika kami diizinkan, kami akan mengeksplorasi cadangan tersebut. Pemerintah berencana mengadakan lelang untuk sekitar 25 ladang minyak dan gas. Sebagian baru. Dari antara 25 lokasi, Semai mencakup 5 blok.

2 Oktober

- [PT Freeport Indonesia](#) diperintahkan oleh Pengadilan Sengketa Hubungan Industrial untuk membayar Rp. 2,4 milyar sebagai ganti rugi terhadap Timotius Kambu dan memulihkan status kepegawaiannya. Timotius dikontrak Freeport pada Desember 2000 dengan gaji Rp. 15 juta per bulan dan dipecat oleh PTFI pada tahun 2001 meski dia masih terikat kontrak hingga 2017. Pengacara PTFI, Anton Raharusun, menyatakan bahwa mereka akan memperkarakannya ke Pengadilan Negeri Jayapura karena Pengadilan hubungan Industrial telah merampas 45 rumah dan 27 mobil perusahaan total senilai Rp. 6,175 milyar.

4 Oktober

- Sekitar 300 orang warga Dewan Adat Byak melakukan unjuk rasa di depan DPRD Biak menuntut agar pemerintah mencabut kembali keputusan penetapan daerah peluncuran satelit di tahun 2010. Pieter Yarangga, Ketua DAB, menyatakan, "Perjanjian tentang Peluncuran Satelit Rusia yang ditandatangani di Jakarta tidak sah karena tidak melibatkan DAB dalam pembicaraannya".

10 Oktober

- Menteri Energi, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan setelah menghadapi serangkaian masalah seperti lingkungan hidup, dana, kontrak karya, kebutuhan energi regional, BP Tangguh telah memberikan keuntungan baru kepada Indonesia senilai USD 6,5 milyar melalui proyek [BP Tangguh](#) yang mencakup 14 triliun kubik. Sebagai salah tambang gas terbesar di Asia, BP Tangguh akan mengeksport LNG ke Cina sebagai investor terbesar kedua dalam proyek ini untuk memenuhi permintaan energi secara bertahap pada waktu yang sama untuk Cina dan Indonesia sendiri, untuk menambah ekonomi dalam negeri Indonesia selama tiga tahun pertama secara bertahap dengan hasil 7,6 triliun kubik. Setelah tiga tahun baru akan dilakukan kontrak berikutnya selama 25 tahun.

27 Oktober

- Sebanyak 20 Koli Gaharu yang sempat diamankan jajaran Polsekta KP3 Laut Jayapura karena awalnya diduga tidak memiliki dokumen yang sah akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya, Djasny Lanau yang merupakan Plasma PT. Indosejati beralamat di Jalan Kemiri No. 557 Sentani, Kabupaten Jayapura. Menurut Djasny Lanau, gaharu dikumpulkannya dari Waropen Atas dan kemudian dikirim ke Jayapura sudah mempunyai dokumen yang sah. "Waktu itu saya ketinggalan kapal sehingga saya tidak bisa membawa dokumen-dokumen gaharu tersebut."

31 Oktober

- Menyikapi krisis air di Kota Jayapura melalui Gerakan Nasional Kemitraan Peduli Air (GNKPA) yang dicetuskan 14 Departemen RI, Pemerintah Kota Jayapura menetapkan sub daerah aliran sungai (DAS) Kampwolker. Menurut Kepala Bapedalda Kota Jayapura, Drs. Jan Hendrik Hamadi saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan saat ini sub DAS Kampwolker kondisinya sudah parah dan berada dalam ambang batas rawan, sehingga bila tidak ditangani secepatnya, dikhawatirkan ketersediaan air bagi masyarakat kota Jayapura makin kritis.

1 November

- Perjuangan Lembaga Masyarakat Adat Masyarakat Ugimba Paniai (LAMUP) selama 7 tahun lamanya terhadap pengakuan hak ulayat atas tanah adat Gunung Grasberg yang saat ini menjadi lahan eksploitasi PT. Freeport Indonesia (FI), akhirnya membuahkan hasil. Terkait dengan hal itu, LAMUP minta pusat mempercepat revisi kontrak karya yang kedua dengan Freeport. Melalui

perjuangan LAMUP, Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov), Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP, dan Pemerintah Pusat, Suku Amugme, Lemasa, Suku Wamtombenal, Pemerintah Daerah setempat, mengakui hak kesulungan atas tanah Grassberg itu.

- Juru Bicara LAMUP, Samuel Tabuni dalam acara konferensi pers di PTC, Entrop menyatakan, pihak LAUMP memiliki kesempatan besar untuk terlibat dalam revisi renegotiasi kontrak karya pertama dan kedua PT. Freeport yang sudah ada di Pemerintah Pusat itu. Ditambahkannya, karena tuntutan moral telah diakomodir dalam draft revisi kontrak karya itu, maka pihaknya juga menuntut agar hak-hak pihaknya yang selama ini terabaikan harus diganti kerugiannya dengan nominal 4,5 triliun, sebab diketahui akibat pertambangan itu masyarakat LAUMP hidup dalam kesengsaraan, ketidakadilan, dan kemiskinan.
- Ketua Kadin Bidang Investasi dan Industri Provinsi Papua, Syahril Hasan, SE pada dialog interaktif di Merauke mengatakan, belum tersedianya infrastuktur yang memadai tersebut, membuat para investor berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Papua, khususnya Kabupaten Merauke, sebab para insvestor berpikir dengan tidak tersedianya infrastruktur yang memadai tersebut modal yang akan diinvestasikan itu sebagian besar akan habis untuk membangun jalan.

5 November

- Bupati Jayapura, Habel M. Suwae, S.sos, MM mengatakan, pengawasan hutan dan cagar alam yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura masih lemah. Standar efektif pengawasan hutan oleh polisis hutan ini adalah 1 orang banding 1000 hektar sampai dengan 1 orang : 3000 hektar. Sementara jumlah polisi hutan yang ada saat ini 23 orang. Potensi luas hutan Kabupaten Jayapura seluas 1.320.455.954 hektar, terbagi hutan konversi suaka alam seluas 84.840.740 hektar, hutan lindung 505.737.000 hektar, hutan produksi/produksi terbatas/hutan konversi seluas 729.878.814 hektar. Dari jumlah areal hutan yang ada ini, maka tugas pengawasan hutan masih membutuhkan tenaga sekitar 400 orang lagi.
- Sekitar 100 orang warga dari berbagai kampung yang ada di Distrik Kurulu melakukan aksi demo damai di halaman Kantor Bupati Jayawijaya. Mereka menuntut kepada pihak pemerintah agar ratusan kubik kayu olahan dari hutan yang sudah dibeli oleh sejumlah para pengusaha di Wamena agar segera dibayarkan. Menurut Wantik salah satu juru bicara pendemo mengatakan, "Kami tidak mau menjadi korban atas nama pembangunan, hukum dan illegal logging karena hak kami dirampas tanpa ada timbal baliknya."

13 November

- PT. Freeport Indonesia melalui siaran persnya mengatakan, selama bulan Juli 2007-September 2007, FI telah melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Indonesia sebesar 434 juta dolar AS atau 4 triliun dengan kurs saat ini. Jumlah tersebut terdiri dari pajak penghasilan badan, pajak penghasilan karyawan, pajak daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 333 dolar AS serta deviden sebesar 52 juta dolar AS. Dengan demikian total pembayaran yang telah dilakukan FI selama tahun 2007 sampai dengan September 2007 telah mencapai 1,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp. 12,6 triliun dengan kurs saat ini.

15 November

- Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH mengatakan, "Untuk melindungi hutan Papua yang luasnya mencapai 42.244.840 Ha, kami dua Gubernur Papua dan Papua Barat telah menandatangani suatu kebijakan. Kebijakan yang baru

disusun telah dituangkan dalam Peraturan Bersama Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat bernomor 163 Tahun 2007 dan No. 16 Tahun 2007 tentang peredaran hasil hutan. Dari total luas hutan Tanah Papua yang mencapai 42.244.840 Ha, itu menutupi 95 persen total lahan yang ada. Dari 95 persen Ha, untuk hutan lindung dan konservasi sebesar 48 persen, hutan produksi 30 persen, hutan konversi 22 persen.

25 November

- Menteri Kehutanan Republik Indonesia Ir. MS Ka`ban, secara simbolis melakukan penanaman pohon berlangsung di Kampung Urum, Distrik Semangga, Merauke. Bupati Merauke Johannes Gluba Gebze, Wakil Bupati Drs.Waryoto dan Muspida, Komandan Satuan, satuan organisasi perempuan, pemuda dan masyarakat turut serta melakukan penanaman pohon tersebut. Di kampung Urum akan ditanami 20 Ha.
- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto dijadwalkan akan memimpin aksi tanam 1000 pohon di kampung Duintui, Distrik Warmare, Manokwari, Provinsi Papua Barat. Aksi penanaman 1000 pohon dilakukan sebagai dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pertemuan perubahan iklim di Bali.

28 November

- Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH menyerukan kepada seluruh rakyat Papua di manapun berada bahkan seluruh rakyat Indonesia dan dunia umumnya untuk menanamkan kesadaran menanam dan memelihara pohon. Hal itu dikatakan pada acara aksi penanaman pohon serentak Indonesia dan pekan pemeliharaan pohon menyongsong pertemuan internasional tentang perubahan iklim global (COP 13 UNFCCC). Acara yang berlangsung pukul 10.00 WIT tersebut dihadiri oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Haryadi Soetanto Kapolda Papua Irjen Pol Max Donald Aer, para pejabat dilingkungan instansi teknis terkait dan diikuti oleh unsur pemuda (KNPI), instansi pemerintah, TNI-Polri, Perguruan Tinggi, Kadin dan masyarakat umum.

30 November

- PT Freeport Indonesia mengeluarkan tanggapan terhadap hasil audit sosial dan HAM dari [International Center for Corporate Accountability](#) (ICCA)-New York tahap II. Pada intinya PTFI menanggapi positif hasil audit yang memuji keberhasilan PTFI dalam memperbaiki kinerjanya dalam memajukan kemampuan karyawan, menghentikan keterlibatan satpam PTFI mengendarai mobil polisi dan TNI, memajukan karyawan Papua, dan merombak biro pendidikan dalam LPMK.

1 Desember

- Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Yahukimo, Ir. Samuel Tande Bura, MM mengatakan maksud diselenggarakannya penanaman seribu pohon di Dekai Yahukimo, untuk meningkatkan kepedulian berbagai pihak mengenai pentingnya penanaman pohon dan budaya pemeliharaan pohon secara berkelanjutan dalam rangka mengurangi pemanasan global untuk mencapai pembangunan Indonesia yang bersih. Untuk jenis tanaman yang ditanam, terdiri dari bibit pohon Matoa (*Pametia* sp) sebanyak 700 anakan pohon, bibit pohon Rambutan (*Nephelium Lapaceum*) sebanyak 200 anakan pohon dan Glodokan (*Polyantia Longfolia*) sebanyak 100 anakan pohon. Aksi tersebut diikuti oleh 500 orang yang terdiri PNS, anggota DPRD, TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan masyarakat umum.

- Aksi Gerakan tanam dan Pelihara Pohon dilakukan ibu-ibu Persit Kartika Candra Kirana Korem 174 Anim Ti Waninggap, Jalasenastrri, Pia Ardhia Garini yang tergabung dalam organisasi Dharma Pertiwi wilayah Merauke dengan menanam 1000 pohon di lingkungan kompleks Markas Korem (makorem) 174 Anim Ti Waninggap Jl. Poros, Distrik Tanah Miring, Merauke.

3 Desember

- Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Biak Numfor Ir. AF Lameky mengatakan dari 60.986 Ha lahan kritis yang ada di Kabupaten Biak Numfor, yang direhabilitasi melalui program penanaman sejak 2004 baru sekitar 8.122 Ha. Dalam penanggulangan lahan kritis di wilayah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Kehutanan, selain program Gerhan, dinas kehutanan juga melaksanakan program rehabilitasi seperti program pengamanan hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan.

17 Desember

- Yance Masita anak dari Ondoafi Ham Masita, mengatakan selama ini pengusaha kayu di Distrik Kaureh (Kabupaten Jayapura) tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah, hanya cukup membayar premi kepada pemilik hak ulayat sebesar Rp. 100.000 sampai Rp. 150.000 per kubik untuk kayu ukuran 10x10 cm.

19 Desember

- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Ir Marten Kayoi MM mengatakan, sebagai tindak lanjut dari peraturan bersama Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat No. 163 Tahun 2007 tentang peredaran hasil hutan dan kayu, maka peraturan penghentian peredaran kayu bulat ke luar Papua akan diberlakukan 1 Januari 2008. hal tersebut berdasarkan atas kesepakatan Gubernur Papua dan Papua Barat yaitu kesepakatan Mansinam 20 Februari 2007, dan hasil rapat kerja daerah (Rakerda) antar kedua provinsi di Kabupaten Biak Numfor 18-19 April, serta deklarasi kedua provinsi di Nusa Dua Bali 26 April 2007.

BAGIAN II

ANALISIS PERISTIWA

Triwulan terakhir tahun 2007 dibayangi dengan beberapa peristiwa kunci yang dapat menjadi ukuran bagi perkembangan tingkat perlindungan dan pemenuhan hak azasi manusia. Di bidang hak-hak sipil dan politik, publik Papua dan nasional kembali digugat kesadarannya dengan kunjungan tamu-tamu dari komunitas internasional, khususnya Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan, dubes-dubes, dan anggota Konggres Amerika Serikat. Sementara itu, peristiwa penaikan bendera Bintang Kejora di Timika menambah ketegangan situasi tidak hanya di Papua tetapi langsung ke tingkat nasional sehingga lahir PP No. 77/2007 tentang Lambang Daerah oleh Presiden SBY tepat pada hari HAM, 10 Desember 2007.

Sementara itu di bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, tingkat pemenuhannya juga tidak lebih baik daripada perangkat hak-hak sipil. Tingkat kesejahteraan masyarakat dan berbagai layanan publik tetap buruk meski hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya. Tingkat kesehatan dan upaya mencerdaskan masyarakat belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus.

Industri ekstraktif Papua tetap menjadi tantangan berat masyarakat. Salah satu hal yang penting dicatat adalah hasil audit sosial dan HAM terhadap PT Freeport Indonesia yang dikeluarkan pada akhir tahun ini yang menandai upaya perusahaan tambang raksasa dunia tersebut untuk menjaga reputasinya di mata publik. Perusahaan-perusahaan lain di Papua belum menunjukkan upaya sedemikian sehingga publik tetap menantikannya.

Pokok-pokok inilah yang mengisi lembaran peristiwa di Papua selama tiga bulan yang sekaligus menutup agenda tahun 2007 yang mengisyaratkan secara kuat berbagai upaya untuk menembus kebuntuan di berbagai bidang hak asasi manusia.

A. Hak-hak Sipil dan Politik

1. Kebebasan Warga

Tidak banyak catatan peristiwa khusus terjadi dalam kurun waktu tiga bulan terakhir yang menyangkut kebebasan warga tetapi itu tidak berarti tanpa kejutan. Salah satu yang penting dicatat di sini adalah kunjungan Pelapor Khusus PBB Urusan Anti Penyiksaan, Professor Manfred Nowak, yang menjadi pejabat PBB kedua yang menginjakkan kaki di Tanah Papua pada tahun ini setelah Ibu Hina Jilani pada Juli 2007 lalu. Kunjungan ini menjadi tonggak sejarah penegakkan HAM di Papua, khususnya upaya memerangi praktik penyiksaan di Tanah Papua, yang sudah mendarah daging dalam sistem keamanan dan pertahanan wilayah tersebut.

Kunjungan ini merupakan terobosan dalam bidang penegakkan HAM mengingat sudah 13 tahun lebih kantor Pelapor Khusus PBB Urusan Anti Penyiksaan meminta izin untuk berkunjung ke Indonesia tetapi barulah pada tahun 2007 ini akhirnya diizinkan. Hal ini kiranya merupakan peluang perubahan bagi korban kasus penyiksaan dan juga bagi lembaga-lembaga penegak hukum.

Pasal 1 ayat 1 Konvensi PBB menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia memberikan definisi tentang “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa

sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang iut atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum

Namun demikian, cara berkunjung pelapor ini berbeda dengan pendahulunya, Ibu Hina Jilani. Manfred Nowak datang dan pergi diam-diam dan menghindari liputan media massa sehingga tidak membahayakan sumber-sumber informasi yang ditemuinya.

Di samping kemajuan dan keterbukaan negara kepada mekanisme HAM PBB, sejumlah kasus penganiayaan masih terus terjadi di lapangan dan bahkan menimpa pejabat pemerintah hanya berdasarkan prasangka buruk. Kepala Distrik Arso dianiaya oleh Serka Dedy, anggota Kopassus, karena sorot lampu mobil sementara itu buruh perkebunan sawit, Rudy Pagawak, dianiaya hingga tewas oleh komandan pos TNI di Lereh karena tidak permisi dan menoleh dua kali ke pos TNI. Hal yang amat remeh berakibat pada tindak kekerasan dan bahkan kematian.

Hal serupa dilakukan oleh anggota Polsek Sarmi yang melukai warga Baudi dengan tembakan hingga salah satu korban berada dalam kondisi kritis semata-mata karena curiga pada warga yang membawa parang padahal korban mau kerja kebun. Peristiwa-peristiwa ini masih disusul dengan perkelahian antara perwira polisi di Timika yang berakhir pada kematian Kepala Samapta Polres Mimika. Tidak hanya itu. Insiden ini berbuntut pada amuk massa suku pendukung korban terhadap suku pelaku sehingga berakibat pada perusakan rumah-rumah warga termasuk mereka yang bukan sesuku dengan pelaku.

Meski bentrokan ini dengan segera ditangani dan diselesaikan oleh Polda Papua, kerusakan dan teror yang ditimbulkan seakan diterima begitu saja. Tidak ada ganti rugi yang berarti bagi korban-korban perusakan dan juga tidak ada proses hukum bagi para pelaku perusakan. Boleh jadi ini merupakan langkah kompromi untuk meredam kemarahan kedua belah pihak yang bersengketa.

Jika kita menelitinya lebih jauh, kasus-kasus di atas tetap mengindikasikan bahwa perilaku aparat keamanan dan aparat pertahanan di lapangan belum banyak berubah. Bahasa kekerasan, main hakim sendiri, arogansi merupakan ciri khas yang mudah ditemui. Apakah perilaku ini dapat berubah seiring dengan reformasi di tubuh TNI dan Polri? Apakah pranata baru dengan keluarnya undang-undang tentang TNI dan Polri telah diterjemahkan ke tingkat kurikulum pendidikan masing-masing institusi ini? Kiranya sejarah masih akan mencatat perjalanan ke depan.

Kebebasan warga dinodai dengan keputusan Kejaksaan Agung yang melarang buku *Tenggelamnya Rumpun Melanesia* karena dinilai memecah belah kesatuan bangsa. Tindakan seperti ini tak lain sebagai upaya membangkitkan kembali suasana Orde Baru dimana kekuasaan pemerintah tidak mau dikritik. Jika ditelaah lebih lanjut, isi buku tersebut bukanlah argumen yang baru. Berbagai seminar publik di Papua maupun di luar Papua telah sering mendengar argumen bahwa orang Papua hampir punah karena operasi militer, derasnya arus migrasi spontan, dan penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV dan AIDS. Namun demikian, buku tersebut senyatanya tidak mengajak orang untuk angkat senjata dan bertindak anarkis atau melakukan teror mental. Karenanya menjadi pertanyaan kita apa sebenarnya yang menjadi dasar

pemberangusan ini? Mengapa tidak ada proses hukum yang membuktikan bahwa buku tersebut berbahaya sebelum dilarang beredar?

Langkah pemberangusan kebebasan berekspresi ini merupakan bukti yang kesekian kalinya tentang represi pemerintah terhadap ekspresi pikiran orang Papua. Ekspresi pikiran adalah bagian dari identitas dan eksistensi seseorang dan suatu bangsa. Karena itu jika ungkapan pandangan seseorang atau suatu bangsa dilarang, maka eksistensinya juga dipasung dan diberangus. Inilah yang terjadi dengan buku karya Sendinus Wonda.

Pelarangan ide terutama terhadap separatisme juga dikemukakan oleh Pangdam XVII/ Cenderawasih yang baru menjabat pada akhir tahun ini. Dalam berbagai kesempatan petinggi TNI ini menegaskan bahwa separatis adalah ide dan harus ditinggalkan. Dengan demikian orang dilarang memiliki ideologi yang dianggap bertentangan dengan ideologi yang diyakini pemerintah. Penegasan ini kembali mengingatkan segala jargon Orba tentang keseragaman tetapi juga menarik untuk disimak karena wacana ini tergolong baru di kalangan TNI. Apakah ada pergeseran paradigma pendekatan?

Jaminan terhadap kebebasan warga dan kebebasan asasi juga ditunjukkan dengan pemulangan pengungsi alias repatriasi dari Papua Niugini ke Papua. IGSSARPRI rupanya aktif dalam segala upaya pemulangan pengungsi ini sehingga menjadi pertanyaan kita mengenai siapa sebenarnya mereka? Tokoh seperti Franzalbert Yoku yang dikenal sebagai anggota Presidium Dewan Papua ternyata ambil peran penting di sini sehingga mendatangkan kebingungan kepada masyarakat mengenai motivasi kembalinya para pengungsi ini: apakah murni keinginan mereka, apakah mereka sudah merasa aman, atau karena rekayasa tertentu?

Pertanyaan ini menggugat kita karena kembali terjadi pengungsian lima orang Papua ke Australia dan ditangkap di P. Sabai, ditahan di P. Horn selama 26 hari, sebelum akhirnya dideportasi ke PNG. Fakta yang jauh dari amatan publik ini menegaskan bahwa gerakan pengungsian orang Papua ke PNG dan Australia terus terjadi diam-diam sehingga kita pantas bertanya apakah mereka tetap tidak merasa aman di tanah sendiri? Jika benar, apa yang menyebabkan tidak aman? Atau jika tidak benar, apa yang menjadi motivasi mereka mengungsi? Pertanyaan sedemikian dan pertanyaan mengenai repatriasi tidak terlalu mudah diberikan jawaban mengingat dimensi politis yang melatarbelakanginya.

2. Pertahanan dan Keamanan

Suhu pengawasan selalu meningkat menjelang 1 Desember setiap tahunnya. Keadaan ini sudah dapat diantisipasi sebelumnya sehingga pihak polisi dan tentara selalu berjaga-jaga di sekitar tanggal tersebut agar Bendera Bintang Kejora tidak dikibarkan dan orang Papua tidak berteriak 'merdeka'. Peningkatan penjagaan dan pengawasan memang sudah menjadi sebuah ritual tahunan yang telah terjadi selama lebih empat dasawarsa dan makin meningkat sejak Orde Baru tumbang.

Dengan demikian, baik langsung maupun tidak langsung entah suka atau tidak, 1 Desember telah menjadi ekspresi politik orang Papua yang mendapatkan reaksi serius dari pemerintah dengan gelar pasukan TNI dan Polri menjelang hari tersebut. Di pihak lain, orang Papua sendiri terus memaknai hari tersebut dengan mengenangkan kembali pembentukan *Nieuw Guinea Raad* yang menetapkan bendera Bintang Kejora sebagai Bendera Bangsa Papua dan Lagu 'Hai Tanahku Papua' sebagai lagu kebangsaan Papua.

Sejarah telah mencatat peristiwa ini dan mematri dalam ingatan kolektif orang Papua. Selama orde baru, catatan sejarah ini merupakan ingatan yang berbahaya sehingga dibungkam dan tidak jarang dengan tindakan yang amat represif. Namun meski Orde Baru telah 10 tahun berlalu, kebijakan represif ini masih terjadi.

Senyatanya selain Bendera Bintang Kejora terdapat juga Bintang 14 dari kelompok melanesia barat; namun reaksi aparat keamanan dan pertahanan tak jauh berbeda. Apakah kebuntuan ini dapat ditembus dengan reformasi dalam tubuh TNI dan Polri? Seandainya demikian, apakah kebijakan dari badan-badan intelijen negara juga terbuka akan reformasi dan transparansi? Semua pertanyaan ini saling berkaitan dan terus dapat ditambah tetapi masih sulit menemukan jawaban pasti.

3. Penyelenggaraan Pemeritahan

Bidang pemerintahan merupakan bidang yang mengisi berita-berita media massa cetak dan elektronik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah merupakan pokok yang tetap menyedot perhatian publik.

Catatan peristiwa akhir tahun 2007 ini merekam bagaimana pemda kabupaten dan pemda provinsi Papua berjuang untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pertanggungjawaban dana tetap merupakan isu besar yang belum teratasi. Pengembangan masyarakat pedesaan tetap merupakan tantangan yang belum menjadi fokus kebijakan pembangunan pemkab-pemkab meski Pemprov Papua mencoba melakukan terobosan dengan program RESPEK.

Ditinjau dari segi anggaran Gubernur Papua melaporkan bahwa realisasi anggaran baru mencapai 26,76% sedangkan realisasi fisik baru sebatas 33,44% dari APBD 2007. Dua indikasi ini baru mencakup segi biaya dan bangunan fisik. Belum dilihat lagi segi mutu dan pembangunan manusianya yang boleh jadi luput dari segala pengamatan.

Laporan ini menunjukkan bahwa sebagian terbesar dana diparkir saja tanpa alasan yang pasti; sedangkan capaian fisik juga amat rendah. Paparan ini amat mengherankan mengingat semua pejabat selalu berbicara muluk-muluk mengenai rencana pembangunan tetapi masyarakat sulit menemukan bukti di lapangan ataupun menjumpai mereka di kantor. Masalah kesejahteraan yang dihadapi sehari-hari oleh masyarakat juga menjadi ukuran nyata seberapa jauh kinerja pemerintah dalam melayani kepentingan rakyat³. Dengan demikian sulit dihindari kesimpulan bahwa jajaran birokrasi pemda tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan programnya sendiri.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD terhadap dana publik yang tersisa sekitar 80% tersebut? Sejauh ini tidak terdengar kabar berita bahwa DPRD sebagai lembaga kontrol pemerintah atas nama rakyat memeriksa laporan gubernur. Akibatnya rakyat juga makin tidak berdaya menghadapi kemandegan ini.

4. Penanganan Konflik

Upaya mencari jalan keluar bagi konflik politik yang berkepanjangan di Papua menjadi perhatian mereka yang ada di Papua dan di luar Papua. Di tingkat lokal, berbagai pihak dihadapkan pada konflik horisontal di sekitar kota Timika yang tak kunjung henti. Di tingkat Papua, para pemuka agama kembali merefleksikan upaya kampanye Papua Tanah Damai. Hal serupa dikembangkan oleh Koalisi Nasional Papua. Sementara itu di tingkat internasional, anggota kongres AS, Eny

3 Lihat Bagian B.4 Kesejahteraan Rakyat di bawah ini.

Faleomavaega, Dubes Swiss, Dubes Amerika turun langsung ke Papua guna melihat keadaan di lapangan.

Dalam lingkup yang lebih sempit, Timika kembali menambah sejarah panjang konflik horisontal antara marga atau suku. Kali ini perang antar marga terjadi di Tembagapura, tak jauh dari lokasi tambang emas dan tembaga raksasa dunia PT Freeport Indonesia. Motif perang tak lain adalah dendam lama yang disulut dengan kenyataan sosial dewasa ini dengan pergeseran perimbangan penduduk.

Fakta ini menguak betapa dalam luka dendam yang tersimpan dalam ingatan kolektif orang Tembagapura dan betapa mudah luka itu menjadi bara api yang membakar tenaga balas dendam. Sengketa suku terus menerus terulang dan pastilah telah menelan banyak korban jiwa, kerugian material yang besar, serta beban moral yang makin menekan kemampuan orang untuk maju.

Kenyataan-kenyataan ini tidak sesederhana yang menjadi kesan orang kebanyakan. Kampanye Papua Tanah Damai bukan merupakan sebuah kebetulan atau spontanitas sesaat. Gerakan ini merupakan perjuangan panjang kalangan pejuang perdamaian yang mencurahkan perhatian untuk mencari jalan pemecahan konflik di Papua. Perjuangan mencari jalan keluar damai bukanlah pekerjaan mudah dan tanpa risiko.

Gerakan Papua Tanah Damai yang dirumuskan bersama pada tahun 2002 oleh sekitar 40 organisasi dari berbagai latarbelakang memang sebuah perjuangan untuk membangun suasana yang lebih terbuka, bebas, adil dan bermartabat⁴. Karenanya para pemuka agama tak kenal lelah memelopori dan memotori gerakan ini yang tentu saja naik turun iramanya. Pada akhir tahun 2007 ini para pemimpin agama bersama SKP dan Imparsial merefleksikan arti dialog bagi masyarakat Papua di segala tingkat.

Selain itu, para pemimpin agama memberikan perhatian besar sepanjang tahun ini pada gerakan penanganan HIV-AIDS sebagai salah satu tantangan besar dalam upaya membangun damai di Tanah Papua. Inilah salah satu wujud konkret membangun damai di tataran hidup keseharian di Tanah Papua ini yang makin diancam oleh bahaya penyakit ini sementara sebagian besar orang masih berpikir bahwa masalah itu datang dari luar dan bukan 'sa punya urusan'.

Yang lebih menarik perhatian kita adalah sejumlah pejabat tinggi asing datang ke Papua dan mencoba mendalami masalah yang ada di tanah ini bahkan seorang anggota DPR dari sebuah negara asing jauh-jauh datang berkunjung ke satu bagian kecil. Fakta ini sangat ironis mengingat politisi negeri ini sendiri tidak banyak menaruh perhatian kepada orang Papua. Mengapa mereka merelakan diri datang? Apakah tidak terlalu berisiko bagi karier politik mereka? Apa untungnya mereka berjalan jauh-jauh ke Papua? Semua pertanyaan ini sah-sah saja dan masih dapat diperpanjang. Jawabannya kiranya juga belum sepenuhnya tersedia.

Namun yang dapat kita saksikan bersama adalah fakta kehadiran dan perhatian penuh dari orang asing kepada orang Papua. Fakta ini kiranya tak terbantahkan. Mereka datang bukan karena hobi atau demi studi banding tetapi sungguh mau menyaksikan dan mendengar sendiri kenyataan di lapangan mengenai kehidupan orang Papua mulai dari kebebasan fundamental, hak-hak sebagai warganegara, tingkat kesejahteraan, perlindungan hak hidupnya sampai dengan soal aspirasi-aspirasi politiknya. Kenyataan inilah yang menggerakkan mereka untuk datang.

4 Tim SKP Jayapura, 2002. *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi*, Jakarta: SKP Jayapura.

Selain kalangan pejabat negara, kalangan masyarakat sipilpun tetap mencari jalan agar konflik di Papua segera berakhir. Gerakan para pemuka agama dengan Papua Tanah Damai disambut dengan gerakan *Faith-based Network for West Papua* yang terus mengkampanyekan agenda yang sama di tingkat Eropa guna mencari dukungan dari aktor-aktor penting di Eropa yang telah membantu proses penyelesaian konflik internal di Indonesia. Di penghujung tahun 2007 ini, jaringan kerja ini kembali bertemu di Jenewa untuk mengevaluasi gerakan mereka.

Dari peta konflik dapatlah ditarik kesimpulan bahwa konflik di Papua terdiri dari berbagai macam wujud dan lingkupnya sehingga upaya-upaya konflik juga beragam seturut sifat dan jangkauan permasalahannya.

5. Aspirasi M(erdeka)

Meningkatnya suhu politik dan penjagaan di penghujung tahun ini amat berkaitan dengan ungkapan-ungkapan aspirasi M yang setiap kali tercetus pada 1 Desember dan juga 14 Desember. Selain itu upaya penanganan konflik Papua yang diuraikan di atas tak lepas dari bara aspirasi M yang menyala dalam sekam.

Kita dapat mengamati berbagai pernyataan pejabat di muka publik mulai dari Bupati Jayapura, Kalapas Abepura, Ketua DPRP, Gubernur, Kapolda, hingga Pangdam yang intinya melarang perayaan "hari nasional Papua" dan menilainya sebagai gerakan separatis jika diadakan penaikkan bendera Bintang Kejora.

Sementara itu, pihak masyarakat sipil yang diwakili oleh DAP dan LSM-LSM memiliki pandangan yang beragam. DAP dan YAHAMAK, misalnya, menyatakan perayaan itu tetap diadakan dengan ibadah dan syukuran di tempat tertutup dan menandakan bahwa segala upaya penaikkan bendera adalah di luar tanggung jawabnya. Kontras Papua berpendapat bahwa perayaan 1 Desember adalah ungkapan pencarian keadilan bagi masyarakat korban sehingga tidak hanya bermakna politis.

Di tengah polemik ini, tetap saja terjadi penaikkan bendera di Kwamki Lama yang seketika ditindak secara hukum oleh Polres Mimika. Tujuh dari tigapuluh enam orang pengibar ditangkap, ditahan, dan didakwa makar lalu diajukan ke meja hijau. Dengan demikian, peristiwa ini menambah daftar panjang orang-orang yang dikenai tuduhan makar, diadili, dan dihukum. Sikap aparat penegak hukum sedemikian memang amat lazim di zaman Orba sehingga kiranya mengherankan bagi kita bahwa hal semacam ini terjadi lagi di era reformasi.

Namun kita tidak boleh lupa tentang kejadian penting pada akhir tahun ini saat Presiden mengeluarkan PP No. 77/2007 tentang Lambang Daerah yang melarang segala simbol yang menyerupai lambang bendera GAM, RMS, dan OPM. Pelarangan ini muncul dari rentetan pengibaran bendera di Aceh, Maluku, dan Papua pada penghujung tahun 2006 dan salah satunya di depan mata Presiden SBY langsung. Peristiwa di Maluku tersebut amat menampar sistem keamanan negara sehingga baik Pangdam dan Kapolda langsung dicopot.

Sebaliknya, keluarnya PP 77/2008 langsung mematahkan kerja keras MRP yang mengupayakan agar Bendera Bintang Kejora, lagu Hai, Tanahku Papua, dan burung mambruk menjadi lambang daerah. Usaha yang tak kenal lelah ini akhirnya kandas dan secara implisit Pemerintah mengakui bahwa bendera GAM, RMS, dan OPM adalah lambang kedaulatan. Ironis memang!

Selanjutnya, kebijakan negara ini selain memperkurus masalah ketidakadilan menjadi semata-mata masalah hukum; justru memperkeruh suasana karena makin membakar api dalam sekam yang diam-diam terus menyala. Kemarahan rakyat tidak

ditampung melalui mekanisme politik yang ada tetapi digilas dengan produk-produk hukum sehingga dapat diramalkan bahwa rakyat mencari penyaluran seturut kemauan mereka sendiri.

Di luar Papua, Koalisi Nasional untuk Pembebasan Papua menyerukan agar rakyat Papua diberi kesempatan mengadakan referendum. Seruan ini menyiratkan wacana alternatif yang sebelumnya kurang mendapat tempat di kalangan aktivis politik Papua yang memiliki garis M. Namun, senyatanya di penghujung tahun, garis ini pelan-pelan berkembang menjadi lebih diplomatis dengan seruan referendum.

Garis pandangan senada dikemukakan oleh AWPAA Sydney (Australia) yang coba melobi Forum Negara-negara Pasifik untuk memasukkan Papua dalam agenda sidang tahunan mereka. Sejauh ini Papua selalu duduk dalam delegasi Vanuatu dan sebaliknya Pemerintah Indonesia terus mencoba agar bisa hadir sebagai pengamat meski belum berhasil.

Jelaslah bahwa kebuntuan di aras sejarah dan politik ini tetap tidak bisa mendapatkan jalan keluar dan malah makin disumbat baik dengan mekanisme hukum maupun kebijakan pertahanan dan keamanan. Dengan kenyataan ini, makin besarlah tantangan bagi pihak-pihak yang mengusahakan penyelesaian konflik politik yang berkepanjangan ini. Apakah para pemuka agama mampu meyakinkan petinggi negara dan rakyat Papua untuk menempuh jalan damai?

6. Pemekaran vs Otsus

Penghujung tahun 2007 menjadi tonggak keenam pemberlakuan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua. Perangkat hukum ini merupakan upaya hukum dan politis untuk melindungi orang asli Papua. Namun lintasan peristiwa di akhir tahun 2007 tetap menunjukkan suasana yang tidak banyak berubah. Otsus menemui jalan buntu: sibuk diomongkan tetapi tidak tampak hasilnya.

Uncen mengadakan evaluasi Otsus dan menyimpulkan bahwa belum satu perdasi atau perdasuspun disahkan. Satu-satunya perdasus tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otsus yang sudah disahkan oleh DPRP-pun belum juga ditandatangani oleh Gubernur Suebu. Namun, anehnya Wagub Alex Hese gem hanya menerima baik hasil ini sebagai sebuah kajian ilmiah dan tidak melihat urgensinya bagi Pemprov untuk segera bertindak.

Kenyataan-kenyataan ini membuat masyarakat makin apatis. Sudah tiga tahun lalu, Dewan Adat Papua mengembalikan Otsus dalam peti mati ke DPRP; namun sejak itu tak ada hal baru yang juga berkembang sebagai alternatif Otsus karena aspirasi M sudah dilarang. Kerangka jalan keluar di tengah kebuntuan tidak berkembang baik di tingkat rakyat sementara tekanan kebutuhan pangan dan energi makin menghimpit masyarakat sehingga tak heran bahwa apatisisme ini mudah berubah menjadi agresivisme.

Sebaliknya di tingkat birokrasi upaya menembus kebuntuan juga tidak terjadi. Dua lembaga yang memiliki kewenangan legislasi, yakni DPRP dan Pemprov Papua, ternyata tak bergigi. Tak satupun perangkat hukum dihasilkan dan juga ketahanan pangan dan kemandirian energi makin lemah. Yang terjadi adalah gaya sinterklas dengan berbagi hadiah, sumbangan, bantuan dsb. bagi masyarakat yang memuat mereka makin bergantung pada raskin, BLT, dana otsus, dsb. dan tidak mengembangkan keterampilan pertanian dan pengembangan energi alternatif.

Tetap menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat kita, “Mengapa Pemprov dan DPRD tidak mampu menghasilkan perangkat operasional Otsus? Apakah ini sebuah kebetulan atau kesengajaan atau ketidakmampuan?” Hingga tahun berlalu, kita tetap tidak mendapatkan jawaban selain kebuntuan.

B. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Meski tidak dapat dipisahkan sebagai satu kesatuan hak asasi manusia, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dapat dibedakan dari hak-hak sipil dan politik berdasarkan sifat-sifat hak-hak Ekosob yang menuntut tindakan aktif dari negara.

1. Hak atas pendidikan

Catatan pemenuhan hak atas pendidikan tidak terlalu mencolok mengingat masalah-masalah yang telah mencuat di masa-masa sebelumnya tetap belum terpecahkan. Masalah seperti bebas biaya pendidikan dasar tetap belum bisa dipenuhi oleh pemerintah-pemerintah kabupaten/ kota. Misalnya, hal ini diakui oleh Walikota Jayapura dengan terus terang mengenai ketidakmampuan Kota Jayapura untuk memenuhi hak tersebut. Namun demikian, kita masih dapat bertanya lebih lanjut berapa besar anggaran pendidikan Pemkot Jayapura dalam APBD 2007? Apakah sudah memenuhi kriteria Otsus sebesar 10% dari total APBD?

Sementara itu masalah kesejahteraan guru tidak jauh beda. Pembayaran uang lauk pauk guru-guru di Kota Jayapura menjadi sorotan di tengah kenaikan uang lauk pauk PNS. Kenaikan sedemikian rupanya tidak secara otomatis menjangkau guru-guru yang nota bene sebagian adalah pegawai negeri juga. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan dalam benak kita mengenai perbedaan perlakuan antara PNS umum dengan PNS guru. Golongan terakhir ini rupanya harus menuntut hak sebelum diberikan oleh Pemerintah; sementara itu golongan lain semua dijamin.

Di tengah keadaan sedemikian, salah satu anggota DPRD ternyata masih sibuk dengan angan-angan muluk tentang beasiswa. Sepintas lalu, ide ini bagus tetapi pelaksanaannya membutuhkan sistem manajemen yang rumit mulai dari proses seleksi, panitia seleksi, cakupan pemberian beasiswa. Lebih dari itu, sistem beasiswa adalah pendekatan perorangan dan bukan struktural. Tuntutan dari hak atas pendidikan adalah pembebasan biaya pendidikan dasar bagi semua warga entah miskin atau kaya, entah asli entah pendatang, entah sehat entah sakit. Prinsip kesetaraan terhadap akses kepada ilmu pengetahuan merupakan inti dari hak atas pendidikan.

2. Hak atas kesehatan

Pemenuhan hak atas kesehatan bergantung dari berbagai unsur seperti sarana kesehatan, sarana penunjang kesehatan (air bersih, pengolahan sampah, sanitasi), layanan kesehatan, perilaku masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Di penghujung tahun 2007 ini, masyarakat kita menyoroti bahwa tidak banyak yang berubah dalam unsur-unsur penentu tingkat kesehatan masyarakat.

Unsur yang paling dasar adalah gizi dan ketahanan pangan. Temuan gizi buruk di Distrik Senggi (Kabupaten Keerom) oleh Bupati Celsius Watae, Dinkes Kota Jayapura, atau Ketua Tim Penertiban Makanan dan Minuman Beracun Tingkat Kota, hanyalah contoh-contoh kecil betapa gizi bagi balita belum dipenuhi secara memadai. Lebih lanjut, makanan yang dijual di pasar ternyata tidak hanya tidak bergizi malah beracun. Keadaan ini tentu saja amat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Perilaku masyarakat yang rentan terhadap miras tetap menjadi tantangan besar dalam tataran hidup harian masyarakat. Meski razia miras tetap dijalankan dengan gencar oleh pihak kepolisian dan di Manokwari sudah dikeluarkan Perda Miras, langkah penegakkan hukum semacam ini bukanlah solusi karena perilaku masyarakat hanya bisa berubah secara perlahan-lahan. Sarana yang paling tepat tak lain adalah pembentukan watak melalui pendidikan. Namun, kita sudah mencermati sebelumnya bahwa wajah pendidikan kita makin mundur sehingga makin sulit diharapkan sebagai pengolah dan pembentuk watak generasi baru. Kepala Kerukunan Jayawijaya, mencatat bahwa 77 orang telah meninggal akibat miras pada tahun 2007. Ini berarti rata-rata 6 orang meninggal setiap bulan akibat konsumsi miras tanpa batas.

Sisi lain yang kita cermati sebagai penentu kesehatan masyarakat adalah sarana kesehatan yang tak hanya terbatas pada sarana medis tetapi juga layanan air bersih, pengolahan sampah, sanitasi, dan prasarana lainnya. Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jayapura, misalnya, mengeluhkan minimnya fasilitas pengelolaan sampah di pusat provinsi Papua tersebut. Pengelolaan sampah masih dianggap remeh. Sebenarnya yang disediakan adalah penimbunan atau pembuangan sampah tanpa pengolahan. Semua sampah dari berbagai jenis hanya ditimbun begitu saja di Nafri dan terus mengganggu lingkungan sekitarnya dengan bau yang menyengat.

Situasi yang sama terkait dengan layanan PDAM yang rusak, lambat, atau sering macet. Keadaan semacam ini tidak hanya khas Jayapura tetapi menjadi perkara yang mudah ditemukan di wilayah perkotaan lain di Papua mulai dari Sorong sampai dengan Merauke.

Keadaan di Jayapura ini dapat menjadi tolok ukur keadaan di tempat-tempat lain di seluruh Papua di mana fasilitas lebih terbatas. Kita pantas bertanya apakah pemda-pemda di Tanah Papua memiliki konsep yang utuh mengenai sistem layanan kesehatan masyarakat? Jangan-jangan kesehatan dipahami sebagai perkara pengobatan belaka (aspek kuratif) padahal unsur ini hanya salah satu bagian dari kesehatan.

Hal yang tak kalah pelik adalah endemi HIV dan AIDS yang tetap menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat awam dan prevalensi Papua yang setinggi 2,4% lebih tinggi dari angka nasional yang hanya sebesar 0,2%. Namun demikian, banyak pihak bersikukuh bahwa HIV-AIDS ini bukan penyakit tetapi kutukan dari Tuhan. Lebih dari itu pihak ini mencap bahwa penyebar HIV-AIDS adalah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang nota bene perempuan.

Kelompok ini rupanya tidak memiliki informasi terkini bahwa HIV-AIDS telah menyerang ibu-ibu rumah tangga dan bayi-bayi di wilayah pedalaman Papua. Kenyataan ini tidak ada hubungan dengan PSK tetapi langsung menunjuk pada perilaku kaum suami yang menularkannya kepada isteri-isteri mereka tanpa sadar.

Kesalahpahaman ini berdampak panjang karena para pengambil kebijakan enggan bicara tentang hal ini yang berdampak pada minimnya anggaran untuk pemberantasan penyakit HIV-AIDS bagi KPA-KPA. Keterbatasan anggaran ini akan berdampak pada keterbatasan layanan terhadap masyarakat, khususnya fasilitas tes dan konsultasi (VCT). Dampak lebih buruk adalah upaya pengabaian dan tipu diri karena merasa kebal terhadap bahaya penyakit ini. Karena itu tak heran bahwa penanganan HIV dan AIDS menjadi terkotak-kotak sama halnya dengan kebijakan kesehatan lainnya karena pemahaman kita juga masih terpotong-potong.

3. Kesejahteraan Umum

Tingkat kesejahteraan masyarakat akan ditentukan oleh pemenuhan dua unsur yang telah diuraikan sebelumnya: tingkat kesehatan dan tingkat kecerdasan masyarakat. Dari pengamatan kita, dua unsur di atas masih merupakan PR besar bagi pemda.

Selain itu, perhatian publik banyak terarah pada pemberian uang lauk pauk bagi PNS seperti terjadi di lingkungan Pemkot Jayapura yang menimbulkan polemik sebelum DPRD Kota Jayapura mensahkan hal tersebut. Polemik terjadi karena Pemkot beranggapan bahwa kemampuan finansial pemerintah tidak memadai sehingga tuntutan PNS tidak bisa dipenuhi. Polemik akhirnya berhenti setelah DPRD menetapkan besaran uang lauk pauk sehingga pemkot wajib membayarkannya.

Kasus ini kiranya merupakan contoh bagaimana Pemerintah memenuhi kebutuhan pegawainya yang selalu harus didahului oleh tarik ulur dan adu argumen. Hak-hak pegawai tidak dengan sendirinya dipenuhi dan sebagai akibat pegawai golongan rendah, khususnya guru-guru dan tenaga medis yang bekerja di pedalaman, harus menanggung bertaruh antara mencari nafkah dan melaksanakan tugas. Pilihan kadang amat sulit dibuat karena banyak yang terpanggil untuk melayani pasien dan murid-murid tetapi tidak didukung oleh tingkat kesejahteraan yang memadai meski elit politik selalu mengatakan bahwa dua bidang ini adalah prioritas Otsus.

Unsur lain yang mengemuka karena terus menerus bermasalah adalah penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Di Jayapura, misalnya, penanganan Pasar dan Terminal Youtefa tumpang tindih karena tidak aman, banjir, dan kotor. Fasilitas yang sedianya dijadikan layanan umum ternyata tidak mampu memberikan apa yang dijanjikan. Suasana serupa juga dengan mudah dijumpai hampir di semua wilayah perkotaan di Tanah Papua sehingga kualitas hidup masyarakat juga tidak meningkat.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Catatan akhir tahun ini di bidang pengelolaan SDA amat dipengaruhi oleh wacana pemanasan global yang secara akbar direfleksikan dalam konferensi perubahan iklim di Nusa Dua, Bali, yang diorganisir oleh badan dunia, PBB. Wacana itu menggerakkan kesadaran akan saling ketergantungan setiap manusia di muka bumi ini akan lingkungan yang terjaga.

Gerakan global tersebut diikuti dengan gerakan penanaman pohon di berbagai tempat seperti Jayapura, Yakukimo, dan Merauke. Sementara itu di tingkat kebijakan, Gubernur Papua dan Papua Barat bersepakat untuk tidak mengirim kayu gelondongan ke luar Papua. Fakta-fakta ini tentu memberikan secercah harapan bagi perlindungan lingkungan hidup kita yang makin rusak.

Namun demikian, fakta lain mengatakan bahwa proses rehabilitasi lahan kritis berjalan amat lambat. Kepala Dinas Kehutanan Biak, misalnya, menerangkan bahwa hanya 8.122 ha dari 60.986 ha lahan kritis di Biak dan Numfor berhasil dipulihkan sejak tahun 2004. Ini berarti dalam waktu tiga tahun sehingga setiap tahun hanya sekitar 2.000 ha berhasil diselamatkan. Fakta ini menggambarkan bahwa usaha penanaman pohon di berbagai tempat tak lain hanya ritual, upacara alias formalitas belaka sehingga tidak membawa dampak bagi perbaikan lingkungan kita. Salah satu alasan adalah pemeliharaan bibit tersebut tidak jalan.

Fenomena lain yang terjadi adalah tuntutan penghargaan atas hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam. Tuntutan ini mengemuka di Ugimba (Paniai), Jayapura, Tembagapura, Teluk Bintuni, dan Merauke. Masyarakat bergerak menuntut hak-hak mereka atas sumber daya alam di tanah mereka. Mereka telah melihat pengalaman tambang PTFI di Tembagapura dan kini mereka menuntut agar tanah, air, dan terlebih, manusianya terlindungi.

Meski kurang masuk dalam wilayah pengamatan publik, penghujung tahun ini ditandai oleh hasil audit sosial dan HAM terhadap PTFI yang dilakukan oleh ICCA, sebuah lembaga di New York, Amerika Serikat. Audit ini merupakan yang kedua setelah yang pertama dilakukan pada tahun 2005 oleh lembaga yang sama. Hasil audit sendiri menarik untuk disimak karena PTFI dinilai telah melaksanakan semua rekomendasi audit pertama. Karena itu fokus rekomendasi audit kedua lebih terarah kepada hubungan kerja antara PTFI dengan karyawan-karyawannya.

Penilaian sedemikian tentunya kurang dinantikan oleh khalayak ramai di Papua yang terus menerus memberi cap PTFI sebagai pelanggar HAM dan lingkungan hidup. Namun lebih daripada sekedar citra publik, audit sosial ini amat terbatas pada urusan internal PTFI dan saluran sosialnya, yakni LPMK. Audit tersebut tidak mencakup dampak sosial kehadiran PTFI terhadap dunia sosial yang lebih luas yang berinteraksi dengan PTFI dan kota tambangnya, Timika. Karena itu kita pantas bertanya mengapa fokus audit begitu sempit padahal kriteria AMDAL selalu terarah pada dampak pada masyarakat luas?

Selain itu cakupan HAM yang terumuskan dalam pedoman HAM PTFI terbatas pada pada segi persamaan hak dan non-diskriminatif padahal problem amat nyata dari dampak operasi pertambangan langsung mengarah pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

PENUTUP

Upaya perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia adalah kewajiban negara (Amandemen UUD 1945 pasal 28 I ayat 4). Lembaga-lembaga negara, seperti Pemerintah, DPR, MRP, Kepolisian, TNI, Kejaksaan dsb. sebagai wujud konkret dari perwujudan kekuasaan negara memiliki dituntut untuk mampu memberikan memenuhi kewajiban tersebut. Namun demikian, catatan kita di atas menunjukkan bahwa harapan masyarakat masih jauh dari pemenuhannya.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(Amandemen UUD 1945 pasal 28 I ayat 4)

Keterbukaan di bidang hak-hak sipil dan politik merembes pada bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Namun hal itu pertama-tama adalah perjuangan masyarakat sipil alias gerakan sosial yang tidak berasal dari negara. Kalangan pemimpin agama, pekerja HAM, guru-guru, mantri, petani, dan siapa saja yang bertekad memajukan keadaan HAM di tanah ini—mereka inilah yang mencoba menerobos kebuntuan dengan tak kenal lelah dan dengan pengorbanan yang tidak kecil.

Perjuangan mereka telah menjelmakan perangkat hak asasi manusia ke dalam kenyataan hidup harian sebagai perlindungan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang warganya, sebagai pegangan untuk meminta layanan negara, dan sebagai jalan untuk bekerja bersama sebagai bagian dari umat manusia.
